

**PERAN KONTRIBUSI *PHILANTHROPIC INSTITUTION*
TERHADAP PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*
GOALS (SDGs) MELALUI *PENTAHHELIX MODEL*
(STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi
dan Bisnis Islam

Oleh:
Marcelia Adini Putri
NPM. 1851010327

Program Studi Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**PERAN KONTRIBUSI *PHILANTHROPIC INSTITUTION*
TERHADAP PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*
GOALS (SDGs) MELALUI *PENTAHHELIX MODEL*
(STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi
dan Bisnis Islam

Oleh:
Marcelia Adini Putri
NPM. 1851010327

Program Studi Ekonomi Syariah

Pembimbing Akademik I : Dr. Hj. Heni Noviarita S.E., M.Si.
Pembimbing Akademik II : Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Peran kontribusi BAZNAS dalam membantu tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui *Pentahelix Model* membuktikan bahwa sebagai lembaga zakat resmi yang bersifat non-struktural dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah, program-program yang dibentuk oleh BAZNAS memiliki keterkaitan terhadap 12 point dari 17 point tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif deskriptif dengan sifat penelitian studi kasus dan kepustakaan. Serta sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama adanya BAZNAS selaku lembaga filantropi ialah mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan seluruh masyarakat, yang tentunya hal ini sejalan dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni “*No One Left Behind*”. Dalam mewujudkannya diperlukan peran serta keterlibatan berbagai unsur atau *stakeholder* dalam model *Pentahelix*, yang meliputi Pemerintah selaku kontroler dan regulator, Akademisi dan Pakar sebagai konseptor, Badan Usaha dan Filantropi sebagai *enabler*, Komunitas Masyarakat sebagai akselerator serta Media sebagai expeditor. Keterlibatan kelima unsur atau *stakeholder* serta didukung dengan kesamaan tujuan oleh BAZNAS, dapat meringankan beban pemerintah dalam mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Disisi lain dengan tercapainya kesejahteraan bukan hanya memenuhi tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) maupun BAZNAS selaku lembaga filantropi saja, melainkan tercapainya kesejahteraan masyarakat menandakan tercapainya cita-cita negara Indonesia.

Kata Kunci: *Sustainable Development Goals*, BAZNAS, *Pentahelix*, Kesejahteraan.

ABSTRACT

BAZNAS contributive role in helping achieve Sustainable Development Goals (SDGs) through the Pentahelix Model proves that as an official zakat institution that is non-structural and the only one formed by the government, the programs formed by BAZNAS have links to 12 points out of 17 points the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs).

The method used is a descriptive qualitative method with the nature of case study research and literature. As well as data sources obtained through primary and secondary data with collection techniques through interviews, observation, and documentation

The results of the research show that the main purpose of BAZNAS as a philanthropic institution is to alleviate poverty and prosper the entire community, which of course is in line with the principle of the Sustainable Development Goals (SDGs), namely "No One Left Behind". In realizing this, it requires the participation and involvement of various elements or stakeholders in the Pentahelix model, which includes the Government as controller and regulator, Academics and Experts as drafters, Business Entities and Philanthropy as enablers, Communities as accelerators and Media as expeditors. The involvement of the five elements or stakeholders and supported by the common goals of BAZNAS can ease the government's burden in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). On the other hand, achieving prosperity not only fulfilling the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs) and BAZNAS as a Philanthropic Institution, but also achieving community welfare indicates the achievement of the ideals of the Indonesian state.

Keywords: Sustainable Development Goals, BAZNAS, Pentahelix, Welfare.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERNYATAAN ORISINIL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marcelia Adini Putri

NPM : 1851010327

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PERAN KONTRIBUSI *PHILANTHROPIC INSTITUTION* TERHADAP PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) MELALUI *PENTAHELIX MODEL* (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2022



Marcelia Adini Putri
1851010327



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Kontribusi *Philanthropic Institution* Terhadap
Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)
Melalui *Pentahelix Model* (Studi Pada Badan Amil
Zakat Nasional)
Nama : Marcellia Adini Putri
NPM : 1851010327
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si.
NIP. 1965112019920320022

Pembimbing II

Gustika Nurmalia, S.E.L., M.Ek.
NIP. 2014080919890708133

Ketua Jurusan

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.
NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame | Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Kontribusi *Philanthropic Institution* Terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Melalui *Pentahelix Model* (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional)” yang disusun oleh Marcellia Adini Putri, NPM 1851010327, Program Studi Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 15 November 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. 

Sekretaris : Nur Sya'adi, M.E. 

Penguji I : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy. 

Penguji II : Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek. 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Setyawan, S.E., M.M., Akt.CA.

262008011008



MOTTO

وَلْيَحْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَا فُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."

(Q.S. An-Nisa Ayat 9)

قُلْ إِنَّ رَيْبِي بِبَسْطِ الرِّزْقِ لَمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"Katakanlah, "Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi Rezeki yang terbaik."

(Q.S. As-Saba' Ayat 39)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'aalamiin. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sebagai tanda bakti dan cinta yang tulis, penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Boy Zetra dan Ibu Iswani yang telah mencurahkan kasih sayangnya, mendidik, membimbing dan mengarahkan, serta senantiasa mendo'akanku tanpa henti hingga saat ini.
2. Kakakku tersayang, Shella Maharani Putri yang tiada hentinya mendoa'kan serta memberikan dukungan moril.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu, UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya, terdepan dan berkualitas.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Marcellia Adini Putri dilahirkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2000, merupakan anak kedua sekaligus putri kedua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Boy Zetra dan ibu Iswani. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh diantaranya SD Negeri 1 Way Laga sejak 2005 hingga 2011. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 11 Bandar Lampung dan selesai pada 2014. Setelahnya melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di MAN 1 Bandar Lampung hingga tahun 2017. Selanjutnya menempuh pendidikan non-formal kursus menjahit di Juliana Jaya hingga 2018. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Adapun selama masa perkuliahan, penulis turut aktif dalam organisasi Fakultas yakni KSEI RISEF sejak 2018 hingga saat ini dan turut berpartisipasi dalam perlombaan tingkat Regional maupun Nasional. Selain itu, penulis juga tergabung dalam HMPS ES sejak 2021 hingga akhir kepengurusan.

Bandar Lampung, Oktober 2022

Marcellia Adini Putri
1851010327

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peran Kontribusi *Philanthropic Institution* Terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Melalui *Pentahelix Model* (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional)”**. *Shalawat* teriring salam selalu tucurahkan kepada suri teladan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW. yang *syafaatnya* kita nantikan di hari akhir kelak dan semoga kita termasuk golongan *ummatnya* yang mendapatkan pertolongan.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan dalam menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Atas terselesaikannya Skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Penulis mengungkapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., Akt., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E. Sy. Selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si. dan Ibu Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek. selaku dosen UIN Raden Intan Lampung sekaligus sebagai pembimbing yang telah banyak memebrikan bimbingan, arahan, nasihat dan bantuannya dengan sangat baik sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak sekali ilmu serta dukungan dan motivasi kepada penulis.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah mmeberikan pelayanan dengan baik selama proses perolehan data, referensi, dan lain-lain.

6. Bapak Taris serta seluruh pihak PPID BAZNAS yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
7. Keluargaku tercinta Bapak Boy Zetra dan Ibu Iswani, serta kakakku Shella Maharani Putri serta Bibiku Ismardiana dan Noni Evilia yang senantiasa memberikan dukungan moril serta keceriaan dan motivasi yang tidak pernah surut sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan, satu jurusan, satu almamater, terkhusus teman-temanku di kelas E Ekonomi Syariah angkatan 2018, serta teman PBAK 2018 yang tetap berteman hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan juga terima kasih telah saling menguatkan dalam proses perkuliahan yang penuh suka cita.
9. Tim LKTI *Nur Fawwaz* (Yusuf Al-Akhiri, Triyanti Azlaila N. K dan Nurul Azizah Putri) yang pernah menjadi tempat berbagi ilmu, pemikiran serta pengalaman yang luar biasa hingga saat ini.
10. Teman-teman KSEI RISEF yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk terus berkembang dan kesempatan dalam memperoleh ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya, serta mengenalkan makna dari kekeluargaan diluar daripada ikatan darah dan solidaritas.
11. Kepada HMPS ES terutama Bidang Pendidikan yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa dalam mengenal dunia perkampusan, serta saling berbagi ilmu dan pengetahuan.
12. Sahabatku tersayang sejak 2012, Wulan, Nona, Mila dan Mela yang juga sedang berjuang dengan jalan hidupnya masing-masing, namun tetap saling menguatkan dan memberikan dukungan dalam kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi bidang Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, Oktober 2022
Penulis,

Marcelia Adini Putri
1851010327

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINIL	iv
PERSETUUAN	v
PENGESAHAN	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
H. Metode Penelitian	26
I. Sistematika Penulisan	31

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Manajemen	33
1. Definisi Manajemen dalam Ilmu Manajemen	33
2. Teori Manajemen	36
3. Unsur-unsur Manajemen	38
B. Teori Kesejahteraan (<i>Welfare</i>)	39
1. Konsep Kesejahteraan	39
2. Kesejahteraan dalam Pandangan Islam	44
C. <i>Philanthropic Institution</i> (Lembaga Filantropi).....	47
1. Pengertian <i>Philanthropic Institution</i> (Lembaga Filantropi)	47
2. Lembaga Filantropi Islam	48
3. Aspek-aspek Pendanaan dalam Filantropi Islam	50
D. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	55

1. Konsep <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	55
2. Target Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	57
3. Perkembangan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Indonesia	58
E. <i>Pentahelix Model</i>	61
1. Konsep <i>Helix</i>	61
2. <i>Pentahelix Model</i>	63
3. Teori <i>Collaborative Governance</i>	65
F. Kerangka Berpikir	68

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	71
1. Latar Sosial	71
2. Historis	72
3. Gambaran Umum BAZNAS	73
4. Visi dan Misi BAZNAS	75
5. Tujuan BAZNAS	75
6. Struktur Kepemimpinan	76
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	78
1. Penyebaran LPZ Berdasarkan Wilayah	78
2. Pengumpulan, Penyaluran dan Pendistribusian ZIS	70
3. Pilar-pilar Sosial-Ekonomi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) yang Sejalan dengan ZIS	88

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran BAZNAS Selaku <i>Philanthropic Institution</i> Terhadap Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	93
B. Penerapan <i>Pentahelix Model</i> Terhadap Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)di Indonesia	104
C. Kontribusi BAZNAS Selaku <i>Philanthropic Institution</i> Terhadap Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Melalui <i>Pentahelix Model</i>	111

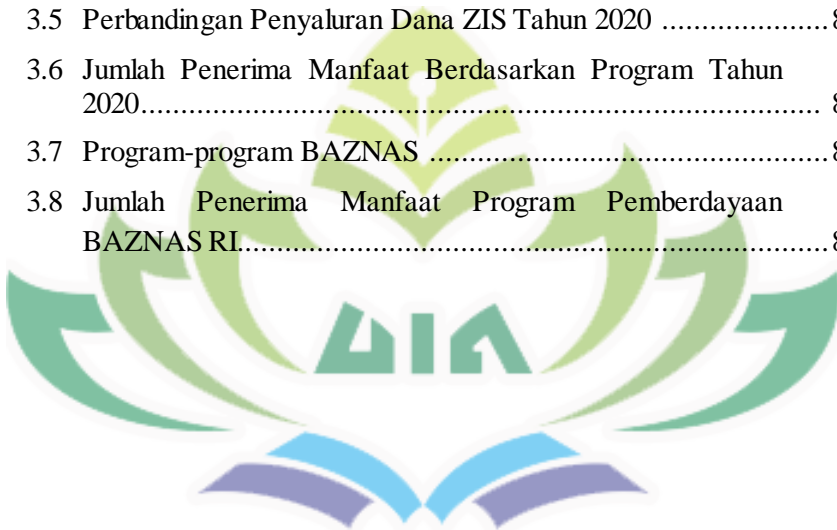
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Rekomendasi	124

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pemetaan 17 <i>Goals Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	8
1.2 Potensi Zakat di Indonesia	10
3.1 Pembagian LPZ Berdasarkan Wilayah	79
3.2 Pengumpulan ZIS Nasional Berdasarkan Jenis LPZ	80
3.3 Perbandingan Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2020	82
3.4 Penyaluran ZIS Nasional Berdasarkan Jenis LPZ	83
3.5 Perbandingan Penyaluran Dana ZIS Tahun 2020	84
3.6 Jumlah Penerima Manfaat Berdasarkan Program Tahun 2020.....	85
3.7 Program-program BAZNAS	86
3.8 Jumlah Penerima Manfaat Program Pemberdayaan BAZNAS RI.....	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 17 Goals Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>).....	7
1.2 Potensi Zakat di Indonesia	9
2.1 Kerangka Berpikir	68
3.1 Grafik Persentase Penduduk Miskin di Indonesia	89
3.2 Grafik Persentase Skor (<i>Global Hunger Index</i>) GHI atas Indonesia	90
3.3 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Penduduk Usia > 15 tahun	91



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Surat Pra Riset
- 2 Surat Riset
- 3 Persetujuan Penelitian
- 4 Pedoman Wawancara
- 5 Dokumentasi Wawancara
- 6 Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian
- 7 Surat Keterangan Bebas Plagiat dan Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang ada. Disamping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul: **“Peran Kontribusi *Philanthropic Institution* terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Melalui *Pentahelix Model* (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional)”**. Untuk itu diperlukannya beberapa uraian dari istilah-istilah judul tersebut, yakni diantaranya:

1. Peran

Menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang dan lingkungannya. Selain itu, peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara strukturan (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya) serta didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang semuanya menjalankan berbagai peran.¹

¹ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J Lengkong, and Joorie M Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon,” *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 48 (2017):2–9.

2. Kontribusi

Secara umum, kontribusi diartikan sebagai suatu keterlibatan yang diberikan oleh individu atau badan tertentu yang kemudian memposisikan perannya, sehingga dapat menimbulkan dampak tertentu yang bisa dinilai dari aspek sosial maupun ekonomi. Selain itu, Soerjono Soekanto mendefinisikan kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana, tenaga, pemikiran, materi, dan segala macam bentuk bantuan lainnya yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.²

3. *Philanthropic Institution*

Filantropi merupakan tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga meluangkan waktu, uang dan tenaganya untuk menolong orang lain. Lembaga filantropi atau *Philanthropic Institution* merupakan lembaga non profit, atau lembaga yang tidak mencari keuntungan dalam pengimplementasian program-programnya. Berdirinya lembaga filantropi berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para penerima manfaatnya dalam jangka panjang dan berkelanjutan, yakni direalisasikan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan kebaikan-kebaikan lainnya.³

4. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sustainable Development Goals (SDGs) atau dalam bahasa Indonesia adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diusulkan oleh berbagai negara pada 25 September 2015 dengan tujuan akhir untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi dan menjamin kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Agenda ini mulai berjalan dari 2015-2030 yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 dan disepakati oleh 193 negara. SDGs memuat

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

³ Nurul Alfatus Sholikhah et al., “Peran Lembaga Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun),” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1, no. 1 (2021): 27.

17 tujuan dengan 169 capaian terukur, yang mana 17 tujuan ini diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.⁴

5. *Pentahelix Model*

Model Pentahelix adalah kolaborasi lima unsur subjek atau *stakeholder* yang terdiri dari akademisi, bisnis (swasta) dan filantropi, pemerintah, komunitas masyarakat dan media.⁵ *Pentahelix* merupakan perluasan dari strategi *Triplehelix* dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat atau lembaga non-profit dalam rangka mewujudkan inovasi. Melalui kerjasama yang sinergis, diharapkan dapat terwujud suatu inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berinteraksi secara sinergis.⁶

6. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu lembaga pemerintah non struktural yang bertugas menerima, mengelola dan mendistribusikan zakat serta bertanggung jawab kepada pemerintah secara langsung sesuai dengan tingkatnya.⁷

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat diartikan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini yakni mengenai penyelidikan Peran dan Kontribusi *Philanthropic Institution*

⁴ Dika Harliadi, *Profil Hasil Analitik Fenetik Siswa pada Pembelajaran Intertebrata di Sekolah Indonesia Singapura* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2016).

⁵ Tri Yuniningsih, Tri Darmi, and Susi Sulandari, "Model Pentahelik dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang," *Journal of Public Sector Innovation* 3, no. 2 (2019): 84–93.

⁶ Herwan Abdul Muhyi dan Arianis Chan, "The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City," *Review of Integrative Business and Economics Research* 6, no. 1 (2017): 412–17, <http://buscompress.com/journal-home.html>.

⁷ Helly Khairuddin, "Analisa Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (Baznas Inhil) Dengan Sustainable Development Goals (SGDs)," *Selodang Mayang* 4 (2018): 107–11.

terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals* Melalui *Pentahelix Model* dengan Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional.

B. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan adanya wabah virus yang menyerang hampir di seluruh negara. Virus ini disebut dengan coronavirus 2019 (nCoV-2019) atau yang lebih dikenal dengan wabah covid-19. Pandemi covid-19 telah memberikan dampak besar pada dimensi kehidupan, terutama bidang ekonomi, seperti terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Sementara disisi masyarakat, pandemi covid-19 menyebabkan tingginya pemutusan hubungan kerja (PHK). Dampak lebih jauh lagi dari pandemi covid-19 adalah bertambahnya angka kemiskinan.⁸

Angka kemiskinan nasional Maret 2020 yang dirilis BPS berada pada angka 9.78 persen. Dengan kata lain, terdapat 26.42 juta penduduk Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan terus meningkat karena dampak ekonomi dari covid-19, menjadi 10,19 persen atau 27.55 juta orang pada September 2020. Tingginya tingkat kemiskinan ini menegaskan pentingnya upaya para pemangku kepentingan untuk memiliki strategi yang mendalam untuk mencegah kemiskinan yang diprediksikan masih akan meningkat.⁹

Pada era modern ini, konsep kemiskinan sudah banyak dikaji. Salah satu yang banyak dibaca adalah konsep kemiskinan multidimensi. Pada tahun 2010, *the University of Oxford* dan *United Nation Development Program* mengkaji hal ini dan merumuskan *Multidimensional Poverty Index* (MPI). Dalam MPI

⁸ Mansur Efendi, "Pengelolaan Filantropi Islam di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komunitas Kurir Sedekah)," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2021): 1–19, <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/filantropi/arti-cle/view/2734>.

⁹ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), 2021), 44.

disebutkan bahwa kemiskinan tidak terbatas pada berapa penghasilan seseorang, melainkan pada hal-hal berikut: Pertama, kesehatan yang buruk karena terbatasnya pengetahuan masyarakat serta akses sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kedua, pendidikan yang rendah. Ketiga, standar hidup yang tidak layak. Keempat, tersisihkan dan tidak terberdayakan. Kelima, pekerjaan yang tidak berkualitas. Keenam, kurangnya rasa aman dari tindakan kekerasan.¹⁰

Program pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat menjadi tidak bisa diabaikan lagi. Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya. Filantropi diartikan sebagai tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan uang, waktu, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Ketika menerangkan filantropi, Al-Qur'an sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam.¹¹

Menurut James O. Midgley, filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan. Disamping itu, filantropi juga merupakan salah satu unsur dalam ajaran agama yang memperhatikan masalah duniawi terutama masalah kemiskinan. Praktik filantropi baik di Indonesia maupun di luar negeri tidak bisa diperbarui dari peran agama. Secara fungsional, agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, baik bagi masyarakat tradisional maupun modern, agama merupakan tempat mereka mencari makna hidup yang *final* dan

¹⁰ Hilman Latief, "Filantropi Islam dan Kemiskinan," *Republika.Co.Id*, 2016, <https://www.republika.co.id/berita/obbhw-74/filantropi-Islam-dan-kemiskinan>.

¹¹ Nasrulloh, "Filantropi Islam: Praktek dan Kontribusinya Terhadap Ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," in *Proceedings 3rd Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS) Kopertais Wilayah IV Surabaya*. 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/ancoms.v3i1.250>.

ultimate sehingga segala bentuk perilaku dan tindakan selalu berkilbat pada tuntunan agama (*way of life*).¹²

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Hal ini dibuktikan berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pada tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam saat ini mencapai 236,53 juta jiwa, yakni jumlah ini setara dengan 86,88% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 272,23 juta jiwa. Dengan besarnya Persentase ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia.¹³

Selain tercatat sebagai negara berpopulasi Muslim terbesar, Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang paling dermawan dan negara dengan tingkat kesukarelawanan tertinggi di dunia. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam bersama-sama mengentaskan kemiskinan.

Diketahui bahwasannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia termasuk Indonesia, yang dibahas secara formal pada *United Nations Conference on Sustainable Development* yang dilangsungkan di Rio De Janiero pada Juni 2012 dengan disepakati oleh lebih dari 190 negara.¹⁴ Program ini dirancang guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) berisi gambaran pembangunan yang didalamnya terdapat beberapa pilar utama pembangunan yakni sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola. Keempat pilar tersebut kemudian diperinci dengan 169 sasaran dan 320 indikator dengan 17 tujuan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

¹² Imron Hadi Tamin, "Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal," *Jurnal Sosiologi Islam* 1, no. 1 (2011): 36–58.

¹³ Viva Budy, "Dukcapil: Jumlah Penduduk Indonesia 272,23 Juta Jiwa pada 30 Juni 2021," databoks, September 2021.

¹⁴ World Health Organization (WHO), "Sustainable Development Global Solutions Network (SDGs)," in *United Nation* (Jakarta, 2015).

Dalam pengimplementasiannya diperlukan kerjasama antar negara, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia dan melibatkan organisasi kemasyarakatan dan media, filantropi dan pelaku usaha serta akademisi dan pakar.¹⁵ Dalam pelaksanaannya, *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak hanya dilakukan oleh negara berkembang saja, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa dengan harapan dapat memenuhi tantangan masa depan dunia. Dimana *Sustainable Development Goals* (SDGs) menekankan pentingnya pemenuhan-pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dan pelaksanaannya harus mampu memberikan manfaat kepada semua orang. Prinsip ini dikenal dengan istilah “*No One Left Behind*” yang artinya “tidak ada seorangpun yang tertinggal”.¹⁶



Gambar 1.1

17 Goals Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Sumber: <http://SDGsindonesia.or.id>

¹⁵ Gabriele Lailatul Muharromah, “Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2021): 1–16.

¹⁶ Khairuddin, “Analisa Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (Baznas Inhil) dengan Sustainable Development Goals (SGDs).”

Tabel 1.1

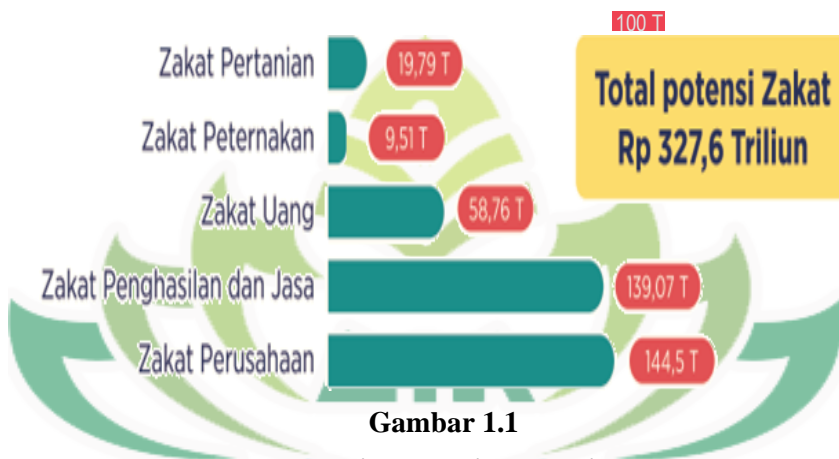
Pemetaan 17 Goals Sustainable Development Goals (SDGs)

Pilar Pembangunan Sosial (5 Goals)	Pilar Pembangunan Ekonomi (5 Goals)	Pilar Pembangunan Lingkungan (6 Goals)	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (1 Goals)
Goals 1: Tanpa Kemiskinan	Goals 7: Energi Bersih dan Terjangkau	Goals 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak	Goals 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Goals 2: Tanpa Kelaparan	Goals 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Goals 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	
Goals 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Goals 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Goals 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	
Goals 4: Pendidikan Berkualitas	Goals 10: Berkurangnya Kesenjangan	Goals 13: Penanganan Perubahan Iklim	
Goals 5: Kesetaraan Gender	Goals 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Goals 14: Ekosistem Lautan	
		Goals 15: Ekosistem Daratan	

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Pada perkembangan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama di Indonesia, berbagai pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian agenda

ini termasuk zakat, infak dan sedekah (ZIS). Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, mengartikulasikan aspirasi tersebut dan terbukti berhasil dalam memberikan kesejahteraan kepada yang miskin.¹⁷ Selain berperan dalam meningkatkan kesejahteraan orang miskin, zakat juga berfungsi sebagai salah satu media untuk distribusi keadilan sosio-ekonomi. Berdasarkan data Outlook zakat Indonesia 2021, potensi zakat Indonesia pada tahun 2020 mencapai 327,6 triliun dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Angka ini terdiri dari zakat perusahaan, zakat penghasilan dan jasa, zakat uang, zakat pertanian, dan juga zakat peternakan.¹⁸



Gambar 1.1
Potensi Zakat di Indonesia
Sumber: Outlook Zakat Indonesia, 2021

¹⁷ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Outlook Zakat Indonesia 2022*.

¹⁸ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Outlook Zakat Indonesia 2021* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2021), 4.

Tabel 1.2 Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun)	Keterangan
1	Zakat Pertanian	19,79	Mencakup potensi zakat makanan pokok sebesar Rp. 13,95 triliun dan perkebunan sebesar Rp. 5,84 triliun.
2	Zakat Peternakan	9,51	Mencakup potensi zakat hewan ternak sebesar Rp. 5,49 triliun dan hewan lain sebesar Rp. 4,02 triliun.
3	Zakat Uang	58,76	Mencakup zakat atas simpanan dalam bentuk deposito pada bank maupun BPR/S sebesar Rp. 2.525 triliun.
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07	Mencakup potensi zakat ASN sebesar Rp. 391 triliun dan non ASN sebesar Rp. 135,16 triliun.
5	Zakat Perusahaan	100	Mencakup potensi zakat BUMN dan zakat BUMD
Total Potensi Zakat		327,6 triliun	

Sumber: Indikator Pemetaan potensi Zakat (IPPZ), 2019 dan Puskas BAZNAS, 2020

Melihat besarnya potensi ini, lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh Pemerintah dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) telah melakukan berbagai program dalam upaya

membantu pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau yang juga dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam realisasinya, BAZNAS telah menghimpun dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) pada tahun 2020 sebesar 385,1 miliar dari total penghimpunan sebesar 12,4 triliun atau berperan sebesar 3,1%.¹⁹ Jauhnya realisasi penghimpunan dan potensi yang ada, menyebabkan adanya tanda tanya. Sebab, seperti yang diketahui bahwasannya BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah. Kurang tegasnya regulasi serta kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS menjadi beberapa faktor mengapa realisasi penghimpunan ZIS masih sangat jauh dengan potensi yang ada.

Padahal jika dibandingkan dengan negara tetangga, khususnya Malaysia. Indonesia masih tertinggal dalam hal penghimpunan ZIS. Sebagai contoh pada tahun 2018, Pusat Pungutan Zakat-Kuala Lumpur berhasil menghimpun dana zakat sebesar RM 651,22 juta atau setara dengan Rp. 2,223 miliar.²⁰ Sedangkan pada tahun yang sama di Indonesia, BAZNAS RI juga berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp. 202 miliar.

Walaupun demikian, jenis program yang dilakukan oleh kerja lembaga filantropi di Indonesia terutama BAZNAS, tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga yang mengelola dana ZIS tersebut memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Misalnya dalam pembangunan sosial, seperti halnya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif, kelaparan dengan santunan kaum *dhuafa*, serta pendidikan berkualitas ditempuh dengan pemberian bantuan beasiswa. Hal ini tentunya akan membawa perubahan kepada kehidupan yang sehat dan sejahtera.

¹⁹ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Outlook Zakat Indonesia 2022*.

²⁰ Muhammad Anwar Fathoni, Suryani, dan Eko Nur Cahyo, "Zakat Management Paradigm: Comparison of Indonesia, Malaysia and Saudi Arabia," *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 14, no. 2 (2020): 267–82, 278, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i2.267-282>.

Sumber daya manusia yang baik tentunya dapat membawa perubahan pada perekonomian, seperti adanya inovasi dan kreatifitas yang dihasilkan oleh masyarakat dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga secara tidak langsung, banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia menandakan pertumbuhan perekonomian negara yang kian membaik. Adanya kemajuan dalam pemikiran membuat masyarakat saling bekerjasama sehingga tercapainya kemitraan dan berkurangnya kesenjangan. Hal ini juga termasuk kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, ZIS (zakat infak dan sedekah) sebagai instrumen pemberdayaan memiliki peran dan kontribusi yang strategis dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).²¹

Namun, hal ini tentunya memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Seperti halnya prinsip dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ke-17, yakni terciptanya Kemitraan untuk mencapai Tujuan, maka terlibatnya berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, badan usaha (bisnis/swasta) dan filantropi, komunitas masyarakat serta media, menjadi faktor penunjang dalam keberhasilan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) tersebut. Peran dan kontribusi yang diberikan dapat berupa tenaga, iuran dana, materi maupun hal lainnya yang dibutuhkan. Disisi lain, keterlibatan kelima unsur atau *stakeholder* ini biasa dikenal sebagai *Pentahelix model*. Di Indonesia sendiri konsep ini sudah mulai diterapkan dan dikembangkan keberadaannya dan merupakan inovasi pengembangan dari model *Quadruple Helix* dengan menambahkan unsur media di dalamnya.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS yang dilakukan lembaga filantropi Islam khususnya BAZNAS memiliki keterkaitan yang erat dengan tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dimana zakat memiliki tujuan utama yakni mensejahterakan umat dan sejalan dengan beberapa point *Sustainable Development Goals* (SDGs) dibidang pembangunan

²¹ Nurma Khusna Khanifa, "Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 149–68, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2329>.

sosial-ekonomi yang ditujukan untuk menghapuskan kemiskinan, mengakhiri kelaparan, serta peningkatan kualitas pendidikan yang membawa pada kehidupan yang sehat dan sejahtera sehingga di kemudian hari dapat mengurangi ketimpangan. Selain itu diperlukannya peran berbagai pihak atau *stakeholder* dalam mensukseskan tujuan ini, seperti peran pemerintah, akademisi dan pakar, badan usaha dan filantropi, komunitas masyarakat dan media.

Melihat permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Peran Kontribusi *Philanthropic Institution* terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Melalui *Pentahelix Model* (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional)”**

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran kontribusi *Philanthropic Institution* terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui *Pentahelix model*. Sedangkan subfokus pada penelitian ini meliputi peran kontribusi BAZNAS selaku *Philanthropic Institution*, disertai beberapa indikator terpilih yang terkait dengan pilar pembangunan ekonomi dan sosial dalam 17 indikator *Sustainable Development Goals*—(SDGs) melalui dukungan kelima unsur *stakeholder* yakni pemerintah, akademisi, badan usaha (swaswa/bisnis) dan filantropi, masyarakat serta media.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang ingin diambil oleh penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BAZNAS selaku *Philanthropic Institution* terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) ?
2. Bagaimana penerapan *Pentahelix Model* terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* di Indonesia?

3. Bagaimana kontribusi BAZNAS selaku *Philanthropic Institution* terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui *Pentahelix Model*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan BAZNAS selaku *Philanthropic Institution* terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)
2. Untuk mengetahui penerapan *Pentahelix Model* terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia
3. Untuk mengetahui kontribusi BAZNAS selaku *Philanthropic Institution* terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui *Pentahelix Model*

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan menambah pengetahuan tentang peran kontribusi *Philanthropic Institution* dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui *Pentahelix model*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang penulis dapatkan di dalam perkuliahan serta syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang kini penulis tempuh.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dan pengambilan

keputusan dalam merumuskan dan merencanakan arah kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan pengetahuan mengenai peran kontribusi yang dapat dilakukan oleh lembaga filantropi di Indonesia dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) disertai dengan keterlibatan lima unsur *stakeholder* lainnya.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai peran kontribusi yang dapat diberikan masyarakat dalam membantu pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), sehingga harapannya dapat benar-benar terlibat dalam perubahan pengembangan sosial dan ekonomi di Indonesia yang lebih baik.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menyatakan keaslian penelitian ini, maka perlu adanya kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji. Adapun penelitian tersebut, diantaranya:

No	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Nasrullah (2019) yang berjudul "Filantropi Islam: Praktek dan Kontribusinya terhadap Ketercapaian <i>Sustainable Development</i>	Perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah dengan penulis memiliki persamaan dan perbedaan, yakni dari segi persamaan, sama-sama membahas mengenai kontribusi	Penelitian Nasrullah telah membuktikan bahwa pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan lembaga filantropi Islam memerlukan dukungan dan apresiasi dari

	<i>Goals (SDGs) ”.</i>	filantropi terhadap ketercapaian <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> . Sedangkan dari segi perbedaannya, pada penelitian Nasrullah, objek penelitian dalam hal ini lembaga filantropi yang dijadikan acuan dalam penelitian yakni Laznas Yatim mandiri, sedangkan pada penelitian ini, objek penelitian yang diangkat oleh peneliti yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).	berbagai pihak, khususnya pemerintah. ²²
2	Helly Khairuddin dan Erwin (2018) yang berjudul “Analisis Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional	Dimana perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Helly Khairuddin dan Erwin dengan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan, yakni dari segi persamaan, sama-sama membahas	Penelitian Helly telah membuktikan bahwa peran BAZNAS Inhil dalam mewujudkan percepatan pencapaian SDGs tidak hanya pada pilar sosial saja,

²² Nasrulloh, “Filantropi Islam: Praktek dan Kontribusinya Terhadap Ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs).”

	<p>Kabupaten Indragiri Hilir (BAZNAS Inhil) dengan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) ”.</p>	<p>mengenai keterkaitan antara BAZNAS dengan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) disertai dengan keterlibatan kelima <i>stakeholder</i> yang meliputi Akademisi, Filantropi, Media, Organisasi Masyarakat dan Sektor Swasta. Sedangkan dari segi perbedaannya, pada penelitian Helly Khairuddin dan Erwin, fokus penelitian hanya sebatas pada keadaan masyarakat daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas secara luas mengenai keselarasan BAZNAS dengan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Indonesia.</p>	<p>namun juga pada pilar ekonomi.²³</p>
3	<p>Gabriele Lailatul Muharromah dan Mustofa (2021) yang berjudul “Paradigma</p>	<p>Dimana perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Gabriele dengan peneliti memiliki</p>	<p>Penelitian Gabriele membuktikan bahwa paradigam SDGs telah diimplementasikan</p>

²³ Khairuddin, “Analisa Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (Baznas Inhil) Dengan Sustainable Development Goals (SGDs).”

	SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia”.	persamaan dan perbedaan, yakni dari segi persamaan, sama-sama membahas mengenai kontribusi filantropi Islam yakni BAZNAS dalam upaya mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) melalui zakat. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian Gabriele target SDGs yang dibahas yakni keseluruhan meliputi 17 target, sedangkan pada penelitian ini, penulis lebih berfokus kepada target yang kiranya berkaitan dengan pilar pembangunan sosial dan ekonomi saja.	pada organisasi pengelola zakat (LPZ) dalam majemen zakat di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa zakat dan SDGs dapat berjalan beriringan. ²⁴
4	Parmin Ishak dan Nur Lazimatul H S (2021) yang berjudul “Implementasi Model <i>Pentahelix</i> dalam	Dimana perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Parmin dan penulis memiliki persamaan dan perbedaan, yakni dari segi persamaan, sama-sama membahas mengenai	Penelitian Parman menunjukkan bahwa pengembangan UMKM yang terjadi di Kecamatan Wonosari telah menggunakan

²⁴ Muharromah, “Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat Di Indonesia.”

	Pengembangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19”.	implementasi dari kelima <i>stakeholder</i> yang meliputi pemerintah, akademisi, komunitas (masyarakat), bisnis dan media atau yang biasa disebut dengan istilah <i>Pentahelix</i> . Sedangkan perbedaannya, pada penelitian Parmin, metode <i>Pentahelix</i> diimplementasikan pada pengembangan UMKM, sedangkan pada penelitian ini, penulis mengimplementasikan <i>Pentahelix</i> dalam pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) .	model <i>Pentahelix</i> dengan melibatkan kelima unsur <i>stakeholder</i> tersebut. ²⁵
5	Nurma Khusna Khanifa (2018) yang berjudul ”Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong	Dimana perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Nurma dan penulis memiliki persamaan dan perbedaan, yakni dari segi persamaan sama-	Penelitian Nurma menunjukkan bahwa relevansi antara tujuan ZISWAF dan SDG secara garis besar berfokus pada 6

²⁵ Parmin Ishak and Nur Lazimatul Hilma Sholehah, “Implementasi Model *Pentahelix* dalam Pengembangan UMKM Dimasa Pandemi Covid-19 Pendahuluan,” *Gorontalo Accounting Journal* 4, no. 2 (2021): 207–24, <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1726>.

	Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo”.	sama membahas mengenai relevansi antara tujuan zakat, infak, dan sedekah dan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) terhadap ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengentaskan kemiskinan ke kondisi sejahtera dalam praktik nyata filantropi. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian Nurma, studi lebih ditekankan ke relevansi ziswaf pada BMT Tamzis Wonosobo, sedangkan pada penelitian ini, penulis lebih menekankan pada studi relevansi ZIS di BAZNAS.	<i>point</i> Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkurangnya kesenjangan serta kebersihan lingkungan. Selain itu, BMT Tamzis Wonosobo juga memiliki cara cara untuk andil dalam pencapaian tujuan tersebut, yakni melalui strategi karitas dan pemberdayaan. ²⁶
6	Khavid Normasyhuri, Budimansyah dan Ekid Rohadi (2022) yang berjudul ”Strategi Pengelolaan	Dimana perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Khavid dan penlis memiliki persamaan dan perbedaan, yakni dari segi persamaan, sama-sama membahas	Penelitian Khavid membuktikan bahwa dana ZIS yang dihimpun oleh LAZIS Nurul Iman sudah efektif dengan memanfaatkan

²⁶ Khanifa, “Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo.”

	<p>Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Pada Masa Covid-19”.</p>	<p>mengenai pengaruh dari dana ZIS terhadap pemberdayaan maupun kesejahteraan umat dalam pencapaian SDGs yakni salah satunya dalam hal pengentasan kemiskinan. Sedangkan dari segi perbedaan, pada penelitian Khavid, fokus lembaga pengelolaan ZIS bersumber dari LAZIS Nurul Iman Provinsi Lampung, sedangkan pada penelitian ini, lembaga ZIS yang diteliti yakni BAZNAS.</p>	<p>digitalisasi saat ini sehingga dana yang dihimpun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu pendayagunaan dana ZIS juga sudah sangat tepat dimana zakat bukan hanya diberikan secara konsumtif, melainkan juga secara produktif sebagai modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diharapkan mampu mengubah kondisi kehidupan yang lebih baik bagi para <i>mustahiq</i>.²⁷</p>
7	<p>Mardhiyah Hayati (2012) yang berjudul “Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan</p>	<p>Dimana perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Mardhiyah dan penulis memiliki persamaan dan perbedaan, yakni dari segi persamaan,</p>	<p>Penelitian Mardhiyah membuktikan bahwa tidak dilibatkannya zakat kedalam sistem ketatanegaraan</p>

²⁷ Khavid Normasyhuri, Budimansyah, dan Ekid Rohadi, “Strategi Pengelolaan Zakat , Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19,” *Jiei: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1947–62, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5792>.

	Zakat dalam Rangka usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia”.	sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan di Indonesia, yang mana kedua program tersebut masuk kedalam target dari 17 tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) . Sedangkan dari segi perbedaan, pada penelitian Mardhiyah subjek yang terlibat hanya terbatas pada pemerintah dan Ulama, sedangkan pada penelitian ini, penulis melibatkan kelima unsur <i>stakeholder</i> atau yang biasa dikenal sebagai model <i>Pentahelix</i> .	menyebabkan dunia Islam kehilangan kekuatan untuk menjalankan program <i>welfare</i> untuk memecahkan masalah sosial ekonomi. Untuk itu, peran pemerintah dan Ulama sangatlah diperlukan. ²⁸
8	Aftina Halwa H, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto (2021) yang berjudul	Dimana perbandingan penelitian yang dilakukan Aftina, dkk dan penulis memiliki persamaan dan	Penelitian Aftina, dkk membuktikan bahwa dengan adanya manajemen dalam

²⁸ Mardhiyah Hayati, “Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2012): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1676>.

	<p>“Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat”.</p>	<p>perbedaan yakni dari segi persamaan, sama-sama membahas mengenai dana zakat yang ada di BAZNAS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan dari segi perbedaan, pada penelitian Aftina dkk, hanya membahas mengenai gambaran singkat daripada fungsi BAZNAS itu sendiri, seperti cara atau manajemen BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat tersebut, sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan mengenai program-program yang telah dibentuk BAZNAS terhadap pencapaian</p>	<p>pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat dapat membantu masyarakat yang mengelola dana zakat tersebut, dan juga pemerintah dalam hal menjaga dan tanggung jawab terhadap terjadinya keadilan, sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi sehingga hal ini akan berdampak juga kepada <i>mustahiq</i> dengan meningkatnya kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi bersama.²⁹</p>
--	---	--	---

²⁹ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 874–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.

		<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan..	
9	Ruslan Abdul Ghofur (2016) yang berjudul “Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat”.	Dimana perbandingan penelitian yang dilakukan Ruslan Abdul Ghofur dan penulis memiliki persamaan dan perbedaan yakni dari segi persamaan, dimana sama-sama membahas mengenai sinergi instrumen distribusi seperti zakat, wakaf, waris, infak dan sedekah yang akan menciptakan kesejahteraan di masyarakat jika semua instrumen ziswaf tersebut dapat berjalan dan dikembangkan dengan baik. Sedangkan dari segi perbedaan, pada penelitian Ruslan Abdul Ghofur penelitian ditujukan untuk mengatasi	Penelitian Ruslan Abdul Ghofur membuktikan bahwa sinergi instrumen distribusi seperti zakat, infak dan sedekah mampu menciptakan jaminan sosial yang menyeluruh bagi setiap segenap lapisan masyarakat. Selain itu dengan terciptanya kesejahteraan akan meringankan beban pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pembangunan ekonomi Indonesia. ³⁰

³⁰ Ruslan Abdul Ghofur, “Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*

	<p>permasalahan kemiskinan dan pembangunan ekonomi Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini, penulis tidak hanya berfokus kepada kemiskinan saja melainkan beberapa <i>point</i> yang ada dalam <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), seperti tanpa kemiskinan dan kelaparan, serta pendidikan yang berkualitas yang merupakan pembangunan sosial namun akan berdampak terhadap pembangunan perekonomian juga.</p>	
--	--	--

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh penulis memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Dari segi tema dan fokus penelitian, sama-sama membahas mengenai peran kontribusi lembaga filantropi Islam dalam pencapaian SDGs disertai keterlibatan dari berbagai pihak demi mencapai tujuan akhir, yakni kesejahteraan. Namun dari segi objek, penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu di atas, dimana dalam penelitian ini objek penelitian berfokus pada BAZNAS serta keterlibatan kelima unsur *stakeholder* yakni meliputi Pemerintah, Akademisi, Badan Usaha dan Filantropi, Komunitas Masyarakat dan Media dalam

mendukung ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) .

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³¹ Menurut Ary, Jacobs dan Razavieh, jenis penelitian studi kasus adalah penelitian yang bertujuan menguji individu, lembaga, atau unit tertentu secara mendalam dengan menemukan semua variabel yang berperan penting pada objek yang diteliti.³²

Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selaku *Philanthropic Institution* serta kelima unsur *stakeholder* lainnya dalam peningkatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) . Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan atau informasi dengan bantuan material seperti buku-buku, jurnal, catatan, dokumen-dokumen dan referensi lainnya yang terkait dengan peningkatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui *Pentahelix Model*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-26 (Bandung: Alfabeta, ISBN: 979-8433-64-0, 2017).

³² Donald Ary, Lucy Cheser Jacobs, and Asghar Razavieh, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, ed. Diterjemahkan oleh Arief Furchan (Surabaya: Usaha Nasional, 1982).

perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Menurut Whitney, metode penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan yang sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³³ Singkatnya, penelitian deskriptif bermaksud untuk menjelaskan berbagai situasi dan kondisi yang menjadi objek penelitian berdasarkan pada peristiwa yang terjadi.³⁴

Dalam penelitian yang bersifat deskriptif penulis menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana peran kontribusi *Philantropi Institution* khususnya BAZNAS terhadap peningkatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui kelima unsur *stakeholder* (*Pentahelix model*).

3. Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan maupun pencarian pada sumber-sumber tertentu. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang berasal dari sumber pertama atau yang biasa disebut *responden*³⁵. Dalam penelitian kualitatif *responden* biasa dikenal dengan narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam

³³ Noviarita Heni, Muhammad Kurniawan, dan Gustika Nurmalia, "Pengelolaan Desa Wisata dengan Konsep Green Economy dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Wisata di Provinsi Lampung dan Jawa Barat)," *JAP: Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, no. 02 (2021): 564–72, 4, <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3761>.

³⁴ Alfatus Sholikhah et al., "Peran Lembaga Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)."

³⁵ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

penelitian.³⁶ Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknis yang digunakan yakni dapat berupa observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion*) dan penyebaran kuisioner.³⁷

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data primer yang bersumber dari wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengurus atau pejabat BAZNAS yakni Bapak Taris selaku Kepala bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI melalui wawancara *online* yang bersifat terstruktur dan semi struktur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.³⁸

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berasal dari buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, tesis, artikel dan situs berita resmi yang berkaitan dengan *Philanthropic Institution* terutama BAZNAS, *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *Pentahelix model*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁹ Untuk

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-26.

³⁷ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, ed. oleh Ayup, Cetakan 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-26.

memenuhi standar yang diperlukan pada penelitian, beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya:

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan maupun tertulis kepada subjek yang diwawancarai dengan wawancara yang bersifat struktural dan semi-struktural. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Pada era teknologi, wawancara dengan bertemu secara langsung (tatap muka) tidak lagi menjadi syarat yang harus dilakukan, sebab dalam kondisi tertentu peneliti dapat berkomunikasi dengan respondennya melalui telepon, *handphone* atau melalui internet.⁴⁰

b. Observasi

Pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung yakni melalui pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat atau waktu terjadinya peristiwa, dan dilakukan secara tidak langsung yakni melalui perantara alat tertentu seperti rekaman video, film, rangkaian *slide* dan foto.⁴¹

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis (arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kliping, dan sebagainya)

⁴⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. oleh Syahrani, Cetakan 1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

⁴¹ *Ibid.*, 80.

maupun dokumen terekam (film, kaset rekaman, mikrofilm, foto, dan sebagainya).⁴² Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses menyusun data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis, dengan cara mengelompokkan data dan memilih data yang penting dan perlu dipelajari serta menarik kesimpulan agar mudah dipahami.⁴⁴ Dalam hal ini, alat analisis data yang digunakan bersifat induktif yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori, dengan tujuan penggunaan untuk menghindari manipulasi data-data penelitian. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini tergolong ke dalam tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁵

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah

⁴² *Ibid.*, 85.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-26., 240.

⁴⁴ Alfiatus Sholikhah et al., "Peran Lembaga Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)."

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-26., 247.

dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.⁴⁶

c. Verifikasi (*Verification/Conclusion Drawing*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁷

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teori kesejahteraan yang merupakan teori inti dalam penelitian, kemudian didukung oleh teori-teori lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan merupakan variabel dalam penelitian ini, seperti *Philanthropic Institution*, *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *Pentahelix Model* serta diakhiri dengan uraian mengenai teori *collaborative governance*.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bagian bab ini berisi gambaran umum daripada objek penelitian yakni mengenai awal mula lembaga filantropi di Indonesia, gambaran umum BAZNAS selaku objek penelitian,

⁴⁶ *Ibid.*, 249.

⁴⁷ *Ibid.*, 252.

disertai penjabaran visi, misi, tujuan dan struktur kepemimpinan. Serta berisi penyajian data dan fakta penelitian yang menguraikan perbandingan data-data yang diperoleh dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan penelitian yang sejalan dengan fokus dan sub-fokus daripada penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini dijabarkan mengenai analisis data penelitian dari hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Terakhir, pada bab ini berisi simpulan disertai dengan komendasi dari hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Manajemen

1. Definisi Manajemen dalam Ilmu Manajemen

Manajemen pada dasarnya belum memiliki definisi yang baku dan tetap, serta disetujui secara *universal*. Dalam sejarahnya, akar kata manajemen berasal dari bahasa Italia “*maneggiare*” yang berarti mengendalikan.⁴⁸ Selanjutnya, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis Kuno *manage-ment* yang memiliki arti: seni melaksanakan atau mengatur. Ada juga kata Manajemen yang berasal dari bahasa Inggris: *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai mengurus atau kemampuan menjalankan dan mengontrol suatu urusan atau “*act of running and controlling a business*”.⁴⁹

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti tugas yang dilaksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal.⁵⁰ Dalam proses manajemen, istilah efektif menjadi kriteria pencapaian tujuan atau sasaran organisasi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Robbins dan Coulter bahwa kegiatan manajemen mengacu pada proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.⁵¹

⁴⁸ Lilis Sulastri, *Manajemen: Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori dan Praktik*, Cetakan 1 (Bandung: La Goods Publishing, 2012), 10.

⁴⁹ Oxford, *Learner's Pocket Dictionary* (New York: Oxford University Press, 2005).

⁵⁰ Sulastri, *Manajemen: Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori dan Praktik*.

⁵¹ Mesiono, *Islam dan Manajemen*, UIN Sumatera Utara, Cetakan Pe (Medan: Perdana Publishing, 2019) 45.

Secara sederhana manajemen dapat diartikan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan POAC: yaitu, Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*).⁵² Lebih rinci, pengertian manajemen dapat ditinjau dari tiga pengertian yaitu manajemen sebagai proses, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia dan manajemen sebagai ilmu (*science*) dan seni, tinjauan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Tinjauan Manajemen	
1	Manajemen sebagai proses	Pelaksanaan Tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi Fungsi untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan. Cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain.
2	Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia	Merupakan suatu kumpulan dari individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolektivitas inilah yang disebut dengan manajemen. Sedangkan orang yang bertanggungjawab terhadap kegiatan manajemen disebut manajer.
3	Manajemen sebagai ilmu (<i>science</i>) dan seni	Menghubungkan aktivitas manajemen dengan prinsip-prinsip manajemen. Manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

⁵² Haryanto, *Rasulullah Way of Managing People* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Group, 2011), 28.

4	Manajemen sebagai seni (<i>art</i>)	Kemahiran seorang manajer dalam menerapkan ilmu pada tataran praktis
---	---------------------------------------	--

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu seni (yang berarti adanya daya cipta ataupun kreativitas untuk menciptakan suatu ide baru) dan juga proses dari kegiatan-kegiatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan manajer dalam pemanfaatan sumber daya baik berupa sumber daya manusia dan juga finansial guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen sebagai suatu ilmu merupakan bidang yang harus dipelajari sebagaimana bidang-bidang keilmuan lainnya. Manajemen sebagai suatu bidang ilmu memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya:

- a. Adanya kolektivitas atau kelompok manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih.
- b. Adanya kebersamaan kerja atau kerjasama dari kelompok tersebut
- c. Adanya tindakan atau rangkaian kegiatan yang menjadi proses atau usaha dalam mencapai tujuan bersama.
- d. Adanya tujuan yang ingin dicapai melalui usaha tersebut.⁵³

Ilmu manajemen sendiri hampir serupa dengan pengertian manajemen sebagai ilmu. Dimana ilmu manajemen diartikan sebagai suatu bidang studi yang mempelajari tentang cara mengatur orang-orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ilmu manajemen sendiri berkembang setelah Frederick W. Taylor melakukan suatu percobaan *time and motion study* dengan teorinya ban berjalan pada tahun 1886. Dari sinilah awal mula konsep teori efisien dan eektivitas. Kemudian pada tahun 1911 Taylor menulis buku berjudul *The Principle of Scientific Management* yang merupakan awal dari lahirnya manajemen

⁵³ Sulastri, *Manajemen: Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori dan Praktik*, 14.

sebagai ilmu. Kemudian ilmu manajemen berkembang sedemikian rupa dengan berbagai macam teorinya.⁵⁴

2. Teori Manajemen

Dalam sejarahnya, teori-teori manajemen memiliki proses perkembangan yang bersifat evolusioner dari yang berawal dari pemikiran sederhana hingga mencapai kompleksitasnya pada masa sekarang. Proses perkembangan teori-teori manajemen terjadi melalui berbagai cara sebagai berikut:⁵⁵

- a. Dominasi, yaitu salah satu aliran muncul sebagai yang paling berguna. Aliran ini dapat memanaatkan ide-ide aliran lain secara dominan. Keadaan seperti ini belum terjadi sepenuhnya sehingga pengkajian dari masing-masing aliran masih tetap bermanfaat bagi pengembangan teori manajemen.
- b. Divergensi, merupakan aliran-aliran besar yang masing-masing berkembang secara sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran lain. Perkembangan seperti inipun tidak terjadi sepenuhnya
- c. Konvergensi, yaitu aliran-aliranyang tampil dalam satu bentuk yang sama sehingga batas antar aliran menjadi kabur. Perkembangan seperti ini sudah terjadi meskipun bentuk penyatuannya tidak seimbang karena masih terlihat bentuk dominan dari satu aliran terhadap aliran yang lain.
- d. Sintesis, merupakan pengembangan menyeluruh yang lebih bersifat integritasi dari aliran-aliran, misalnya dalam pendekatan sistem dan kontingensi.
- e. Proliferasi, merupakan bentuk pengembangan teori manajemen yang ditandai dengan semakin banyaknya muncul teori-teori manajemen yang baru dimana teori baru tersebut bukan merupakan sebuah aliran melainkan hanya

⁵⁴ *Ibid*, 15.

⁵⁵ *Ibid*, 46-47.

pemusatan perhatian kepada satu permasalahan manajemen tertentu.

Melalui studi historis dan analisis sejarah dapat dilacak dan diketahui bahwa pada kira-kira tahun 1300 SM, bangsa Mesir telah mengenal administrasi. Max Webber, seorang sosiolog berkebangsaan Jerman yang terkemuka pada zamannya, meyakini Mesir sebagai satu-satunya Negara yang paling tua yang memiliki pengaturan birokratik. Meski belum bisa dijadikan referensi ilmiah untuk disebutkan bahwa ini sudah merupakan praktik manajemen yang memiliki teorinya sendiri, namun fakta ini menunjukkan bahwa kemunculan pemikiran-pemikiran awal tentang manajemen sudah sedemikian lama.

Awal pemikiran tentang teori manajemen sendiri berkembang setelah beberapa tokoh memberikan pendapat mereka tentang bagaimana seharusnya praktik kepemimpinan dan kerja dijalankan pada sebuah organisasi, seperti yang dilakukan oleh Robert Owen dan Charles Babbage pada awal tahun 1800-an. Meski pada keduanya belum ditemukan kerangka penelitian ilmiah, namun keduanya sudah memberikan pemikiran dasar tentang bagaimana seharusnya manajemen itu dipraktikkan. Dari keduanya pula, teori-teori manajemen kemudian berkembang pesat dan terutama setelah dimulainya periode pendekatan saintifik oleh Frederick Winslow Taylor (1856-1925), yang sekaligus memberikan identitas "ilmu" bagi manajemen. Dari pemikiran Taylor ini ilmu manajemen kemudian disempurnakan dengan munculnya berbagai teori dan pendekatan bagi studi manajemen, seperti teori dan pendekatan birokrasi hubungan manusia (*human relation*), teori pendekatan perilaku (*behavioral*), pendekatan kuantitatif, teori sistem, teori kontingensi, dan lainnya.

Dalam sejarahnya, teori-teori manajemen ini yang ada pada hari ini dapat dilihat pengaruhnya dari teori-teori manajemen pra-klasik, teori manajemen klasik, pendekatan hubungan manusiawi (*human relations approach*), pendekatan behavioristik, pendekatan kuantitatif, dan berbagai macam teori-

teori kontemporer yang mencakup teori sistem, teori kontingensi, dan lainnya.⁵⁶

3. Unsur-unsur Manajemen

Manajemen merupakan proses pemanfaatan sumber daya organisasi secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Perilaku administrator/manajer menggunakan pengaruhnya terhadap anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi aktivitas manajemen. Karena itu di dalam proses manajerial ada sejumlah unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen⁵⁷, yaitu:

- a. *Men*, yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
- b. *Money*, yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. *Methods*, yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
- d. *Materials*, yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- e. *Machines*, yaitu mesin-mesin/alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- e. *Market*, yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan.

Unsur-unsur manajemen tersebut mempunyai sifat Interdependensi artinya unsur satu dengan yang lain akan lebih mempunyai arti yang signifikan manakala semua unsur itu bersinergis dan mempunyai nilai urgensitas yang sangat menentukan suksesnya organisasi atau perusahaan. Dalam implementasi unsur-unsur tersebut akan mempunyai nilai kurang jika diterapkan secara parsial. Untuk itu implementasi

⁵⁶ *Ibid*, 49.

⁵⁷ Mesiono, *Islam dan Manajemen*, 51.

sistem perlu digunakan dalam penerapan unsur-unsur manajemen dalam organisasi atau perusahaan.

Setiap unsur manajemen ini berkembang menjadi bidang manajemen yang mempelajari lebih mendalam peranannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Bidang-bidang manajemen tersebut adalah

- a. Manajemen sumber daya manusia yang berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri dari unsur manajemen manusia (*men*).
- b. Manajemen permodalan/pembelanjaan (unsur *money*).
- b. Manajemen akuntansi biaya (unsur *materials*).
- c. Manajemen produksi (unsur *machines*).
- d. Manajemen pemasaran (unsur *market*).
- e. Manajemen strategis adalah cara/sistem-sistem yang dipergunakan dalam setiap bidang manajemen (unsur *methods*).

B. Teori Kesejahteraan (*Welfare*)

1. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran. Erat hubungannya kesejahteraan dengan jumlah penduduk miskin yang ada pada suatu daerah.

Teori kesejahteraan (*welfare theory*) pada umumnya diadopsi dari teori Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation* (1776), bahwa individu memiliki hasrat untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhannya. Dengan kecenderungan individu untuk selalu berusaha memuaskan

keinginannya, maka kesejahteraan akan dicapai pada saat kepuasan mencapai tingkat optimum. Pencapaian tingkat kepuasan inilah yang menjadi kajian ilmu ekonomi,⁵⁸ sebab, dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (*way of life*).

Smith berpendapat bahwa motif manusia melakukan kegiatan ekonomi ialah atas dasar dorongan kepentingan pribadi, bertindak sebagai tenaga pendorong yang membimbing manusia untuk mengerjakan apa saja asalkan masyarakat bersedia membayar. Motif dan prinsip sistem kapitalis adalah perolehan, persaingan dan rasionalitas. Sedangkan tujuan kegiatan ekonominya adalah perolehan menurut ukuran uang.⁵⁹

Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan.⁶⁰

Selanjutnya, sosialisme muncul sebagai gerakan perlawanan ekonomi terhadap ketidakadilan yang timbul dari sistem ekonomi kapitalisme. John Stuart Mill menyatakan gerakan sosialisme ditujukan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung dan tertindas.⁶¹ Sosialisme merupakan suatu kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokrasi pusat. Prinsip-prinsip penting yang disosialisasikan kepada

⁵⁸ Yulhendri Yulhendri dan Nora Susanti, "Analisis Konfirmatory Faktor Pengukuran Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga," *Jurnal Ilmiah Econosains* 15, no. 2 (2017): 185–202, <https://doi.org/10.21009/econosains.0152.02>.

⁵⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, terj. Pota (Jakarta: PT. Intermasa, 1992).

⁶⁰ Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009," *Economics Development Analysis Journal* 1, no. 2 (2012): 1–11, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.

⁶¹ Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*.

masyarakat yaitu: *Pertama*, penghapusan milik pribadi atas alat-alat produksi. *Kedua*, luasnya industri dan produksi menjadi kebutuhan sosial dan bukan kepada moti laba. *Ketiga*, pelayanan dan motif laba digantikan oleh motif pelayanan sosial.⁶²

Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Lovemore (2000), Thompson (2005) dan Suharto (2006), pengertian dan konsep kesejahteraan setidaknya mengandung empat makna, yaitu:

- a. Sebagai kondisi sejahtera.
- b. Sebagai pelayanan sosial.
- c. Sebagai tunjangan sosial.
- d. Sebagai proses atau usaha terencana.

Konsep kesejahteraan dapat diidentifikasi sebagai kondisi atau perasaan nikmat dan nyaman yang disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan material maupun spiritual, baik berupa pemenuhan akan kebutuhan pokok, makan, pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial (terhindar dari segala macam resiko yang mengancam).⁶³

Dalam konsep kesejahteraan, tidak ada suatu batasan substansi yang tegas mengenai kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan biasanya mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, serta seringkali diperluas pada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, bebas dari kemiskinan dan sebagainya. Dengan kata lain, lingkup substansi kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial.⁶⁴

Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas

⁶² Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34, 326, <https://doi.org/10.36908/isbank>.

⁶³ Ulil Amri, "Konsep Kesejahteraan dalam Teori Ekonomi Barat dan Islam (Analisis Perbandingan Pendapat Maslow dan Al-Ghazali)" (UIN Raden Fatah, 2010), 40, <http://repository.radenfatah.ac.id/6597/>.

⁶⁴ *Ibid*, 38.

yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembalikan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.⁶⁵

Sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kondisi sejahtera, istilah 'kesejahteraan' sejatinya tidak perlu pakai kata 'sosial' lagi, karena sudah jelas menunjuk pada sektor atau bidang yang termasuk dalam wilayah pembangunan sosial. Sektor 'pendidikan' dan 'kesehatan' juga termasuk dalam wilayah pembangunan sosial dan tidak memakai embel-embel 'sosial' atau 'manusia'. Di negara lain, istilah yang banyak digunakan adalah '*welfare*' (kesejahteraan) yang secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung.⁶⁶ Selain itu, kesejahteraan sosial juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Kesejahteraan sosial sebagai sistem keadaan,
- b. Kesejahteraan sosial sebagai sistem ilmu, dan
- c. Kesejahteraan sosial sebagai sistem untuk kegiatan dan gerakan.

Kesejahteraan sosial dapat diukur melalui ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan, pemenuhan kebutuhan pokok, kualitas hidup dan pembangunan manusia.⁶⁷ Disisi lain, terdapat

⁶⁵ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Rafika Aditama, 2014), 9.

⁶⁶ Edi Suharto, "Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos," *Welfare State Depsos* 2006, <http://www.policy.hu/suharto/NaskahPdf/ReinventingDepsos.pdf>.

⁶⁷ Tria Agustin and Mike Triani, "Analisis Peran Ganda Wanita Terhadap Kesejahteraan di Sumatera Barat," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*,

juga tujuh karakteristik di dalam kesejahteraan sosial yakni meliputi:

- a. Tuntutan perekonomian yang stabil,
- b. Tuntutan terhadap pekerjaan yang layak,
- c. Tuntutan keluarga yang stabil,
- d. Tuntutan terhadap jaminan kesehatan,
- e. Tuntutan terhadap jaminan pendidikan,
- f. Tuntutan kesempatan dalam bermasyarakat, dan
- g. Tuntutan kesempatan terhadap budaya atau rekreasi.

Hal-hal di atas menjadi tuntutan dasar dalam masyarakat sosial. Selain itu, kemiskinan tidak dapat dihapuskan hanya dengan perlindungan sosial. Karenanya, perlindungan sosial harus terintegrasi dengan strategi penanggulangan kemiskinan lainnya. Dalam penerapannya, kesejahteraan sosial juga tidak bisa hanya dilakukan oleh 'negara' saja, melainkan komponen-komponen lainnya yang nantinya akan memberikan perbedaan kegiatan kesejahteraan sosial dengan kegiatan lainnya. Beberapa komponen tersebut terdiri atas:⁶⁸

a. Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial yang terorganisir yang dilaksanakan oleh lembaga sosial formal untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat karena memberikan pelayanan karena memberikan pelayanan yang merupakan fungsi utama dari lembaga kesejahteraan sosial.

b. Pendanaan

Mobilisasi dana merupakan tanggung jawab bersama karena kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial tidak mengejar keuntungan

c. Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial memandang seluruh kebutuhan manusia, tidak hanya fokus satu aspek untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Agar dapat memenuhi seluruh aspek tersebut lembaga formal menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial.

d. Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial tentunya dilaksanakan dengan proses dan peraturan yang telah di tentukan.

e. Perangkat Hukum dan Perundang-undangan

Pentingnya peraturan perundang-undangan untuk menjalankan pelayanan kesejahteraan sosial secara terstruktur dan tepat sasaran.

f. Peran serta Masyarakat

Kegiatan kesejahteraan melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat iitu sendiri.

g. Data dan Informasi

Data dan informasi sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan secara efisien.

2. Kesejahteraan dalam Pandangan Ekonomi Islam

Islam sebagai konsep hidup telah menjanjikan sebuah keteraturan, keselamatan, kedamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat yang meyakiniinya. Dalam aktivitas kehidupan, Islam mengatur secara moderat berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan melalui kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, serta aturan spesifik dalam setiap detail kehidupan manusia, termasuk dalam hal ekonomi. Keberhasilan ekonomi Islam terletak pada

sejauh mana keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan di antara kebutuhan material dan kebutuhan etika manusia.⁶⁹

Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah *ethical economy*. Sedangkan sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme berangkat dari kepentingan atau *interest*, dimana kapitalisme berangkat dari kepentingan perorangan (*selfishness*) dan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif (*collectivisme*).⁷⁰

Syed Nawab Haider Nagvi, menunjuk empat aksioma etika yakni *tauhid*, keseimbangan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban.⁷¹ Selanjutnya, Afzalur Rahman menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip dan nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam, diantaranya: kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan dan kesejahteraan individu serta masyarakat.⁷²

Dalam ekonomi Islam, seseorang berhak mendapatkan kekayaan karena usahanya selama tidak menzalimi orang lain, dengan catatan kekayaan yang dimilikinya terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Jadi dalam ekonomi Islam, seseorang tidak diperkenankan dalam mengejar keuntungan pribadi jika hal itu merugikan dan menzalimi orang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Sehingga, cara perolehan kekayaan dalam Islam bagi setiap orang adalah harus sesuai dengan koridor Islam, bukan diberikan kebebasan tanpa batas.⁷³

⁶⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, ed. oleh Terj. Soeroyo, Jilid 1 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 13.

⁷⁰ Fadlan, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019), 5.

⁷¹ Syed Nawab Haider Nagvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sistesis Islami* (Bandung: Mizan, 1985), 123.

⁷² Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 9.

⁷³ Dewan Pengurus Nasional Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, ed. oleh Ahim Abdurahim et al., Cetakan 2 (Depok: Rajawali Pers, 2017), 371.

Dalam pandangan ekonomi Islam, peningkatan kekayaan dan distribusi merupakan dua kegiatan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Islam memadukan pertambahan kekayaan dan distribusi sebagai satu tujuan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini didasarkan bahwa peningkatan kekayaan dalam ekonomi Islam bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sebagai tujuan perantara sehingga pertambahan kekayaan dalam Islam harus diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sebab pada harta benda tersebut, ada hak untuk orang-orang fakir dan miskin. Hal ini juga dipertegas oleh Imam Ali r.a. menuturkan bahwa peningkatan kesejahteraan seseorang hendaknya tidak diikuti oleh penurunan kesejahteraan orang lain.⁷⁴

Dalam menjalankan kegiatan muamalah, para ulama memberikan peran yang besar dalam memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi, seperti halnya fungsi kesejahteraan sosial Islami yang merupakan sebuah konsep yang berakar dari pemikiran sosio-ekonomi al-Ghazali. Al-Ghazali mendefinisikan aspek kegiatan ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang *triapastite*, yakni meliputi kebutuhan (*dharuriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyah*) dan kemewahan (*tahsiniyah*).⁷⁵

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan berarti tercapainya kemaslahatan. Konsep masalah atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama) merupakan sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat.⁷⁶ Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan *syara'* (*Maqasyid al-*

⁷⁴ *Ibid*, 373.

⁷⁵ Fadlan, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah, 12."

⁷⁶ Fadlan, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah, 11."

Syari'ah).⁷⁷ Secara lebih rinci, beliau menjelaskan bahwa tujuan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terletak pada perlindungan keimanan (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nash*) dan kekayaan (*al-mal*). Adapun yang menjamin perlindungan terhadap kelima dasar ini, menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan.⁷⁸

Namun hingga saat ini, konsep kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam masih baru mencakup hanya dari dimensi materi saja. Padahal, kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai berdasarkan ukuran material saja, melainkan juga dinilai berdasarkan ukuran non-material, seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral serta terwujudnya keharmonisan sosial. Disisi lain masyarakat dapat digolongkan kategori sejahtera bila terpenuhinya dua kriteria, diantaranya:

- a. Terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan maupun kesehatan.
- b. Terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia

Dengan demikian, kesejahteraan bukan hanya tergolong sistem ekonomi semata, melainkan juga sistem hukum, sistem politik, sistem budaya dan sistem sosial.⁷⁹

C. *Philanthropic Institution* (Lembaga Filantropi)

1. Pengertian *Philanthropic Institution* (Lembaga Filantropi)

Filantropi merupakan tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga

⁷⁷ Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34, 327, <https://doi.org/10.36908/isbank>.

⁷⁸ Fadlan, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah, 13."

⁷⁹ Ilyas Alimuddin, "Konsep Kedejahteraan dalam Islam," *Tribun Timur*, 2012, <https://makassar.tribunnews.com/2012/12/14/konsep-kesejahteraan-dalam-islam>.

menyumbangkan waktu, uang dan tenaganya untuk menolong orang lain. Pengertian filantropi secara lebih luas adalah kesadaran untuk memberi dan menolong yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam jangka panjang.⁸⁰ Selain itu, filantropi juga diartikan sebagai suatu konsep yang terdapat dalam Islam yang bertujuan untuk kebaikan dengan melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Ide atau konsep filantropi merupakan salah satu alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial diantara masyarakat. Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak lepas dari peran lembaga filantropi.⁸¹

Lembaga filantropi merupakan lembaga non-profit atau lembaga yang tidak mencari keuntungan dalam implementasi program-programnya.⁸² Disisi lain, lembaga filantropi diartikan sebagai sebuah lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan umat. Gerakan dari lembaga tersebut adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat secara merata. Gerakan ini pada umumnya dibentuk oleh lembaga swasta, namun dalam perjalanannya pemerintah membentuk lembaga serupa guna membantu programnya-programnya.

2. Lembaga Filantropi Islam

Lembaga filantropi Islam adalah lembaga yang melakukan aktifitas pengumpulan dana masyarakat berbasis agama Islam dengan format zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dana-dana tersebut kemudian dimanfaatkan kembali kepada masyarakat ditujukan kepada yang berhak mendapatkannya dalam rangka mengangkat harkat dan martabatnya baik dari sisi ekonomi

⁸⁰ Alfiatus Sholikhah et al., “Peran Lembaga Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun).”

⁸¹ Muhammad Farhan and Noor Arief, “Peran Lembaga Filantropi dalam Mengentaskan Kemiskinan Warga DKI Jakarta: Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta,” *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (snebis)* 1, no. 1 (2017).

⁸² Alfiatus Sholikhah et al., “Peran Lembaga Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)”, 28.

maupun sosial.⁸³ Secara kelembagaan filantropi Islam berada dalam keuangan publik Islam yang termanifestasi dalam bentuk lembaga ZIS (zakat, infak dan sedekah) dan wakaf. Sebab dalam ajaran Islam, ZIS dapat mengandung pengertian yang sama dan sering digunakan secara bergantian atau dipertukarkan dengan maksud yang sama yakni berderma (filantropi).⁸⁴

Kewenangan dalam mengelola zakat bervariasi di berbagai dunia, ada yang dikelola oleh negara, organisasi masyarakat, atau bahkan kedua-duanya mempunyai peran di dalamnya. Di Indonesia sendiri, zakat, infak dan sedekah dikelola oleh lembaga independen yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Awalnya, pengelolaan zakat di Indonesia di kelola oleh organisasi keagamaan masyarakat dan takmir-takmir masjid dengan sebuah lembaga yang dikenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kemudian hadirilah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh lembaga semi-pemerintah pada tahun 1970-an di Jakarta. Pada awalnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.⁸⁵ Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pengelolaan Zakat terbagi atas dua lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat, baik tingkat nasional, provinsi, maupun

⁸³ Sudiyo dan Fitriani, "Lembaga Ziswaf Sebagai Lembaga Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bandar Lampung," *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*, 2019, 85–89, <http://jurnal.polinela.ac.id/index.php/prosiding>.

⁸⁴ Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*, ed. Mahsun Ismail, *Litera*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (kdt), 2018), <http://digital.library.ump.ac.id/827/1/Dina-mikaFilantropiIslam-Online.pdf>.

⁸⁵ M. Fuad Hadziq, "Modul 1. Fikih Zakat, Infaq dan Sedekah," in *Ekonomi Ziswaf* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 17–19, 13, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/eksa4306-M1.pdf>.

kabupaten/kota. Sedangkan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁸⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁸⁷

Tidak hanya itu, selain BAZNAS disebutkan pula Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (LPZ) dapat membantu BAZNAS dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Indonesia memiliki 572 jaringan Organisasi Pengelola Zakat (LPZ). Pemanfaatan dana ZIS juga perlu disalurkan sesuai dengan kerangka syariah, regulasi dan sesuai dengan kebutuhan Negara Indonesia. Seluruh program yang telah dijalankan oleh LPZ juga mendukung perbaikan-perbaikan dalam permasalahan sosial di masyarakat sebagaimana beririsan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).⁸⁸

3. Aspek-aspek Pendanaan dalam Filantropi Islam

Aspek-aspek pendanaan dalam filantropi Islam diantaranya meliputi zakat, infak, sedekah dan wakaf.

⁸⁶ Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat.*, 30.

⁸⁷ “Tentang BAZNAS,” Badan Amil Zakat Nasional, n.d., <https://baznas.go.id/profil>.

⁸⁸ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2021).

a. Zakat

Zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Sedangkan secara istilah, zakat merupakan suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta sendiri kepada orang lain yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁸⁹ Banyak yang berpendapat bahwa zakat bukanlah sebuah aspek “kedermawanan” melainkan sebuah “kewajiban” yang harus ditunaikan apabila telah mencapai *nishab* tertentu. Namun, pada akademisi di Indonesia setuju untuk memasukan zakat kedalam filantropi Islam dikarenakan masih banyak yang menunaikan zakat atas dasar kerelaan dan kesadaran individu sebab masih belum ada sangsi sosial bagi yang tidak menunaikannya. Oleh sebab itu, membayar zakat disebut kewajiban etis dan dapat disebut filantropi yang didasarkan pada moralitas.⁹⁰

Salah satu ayat suci dalam Al-Qur’an yang menyebutkan kata zakat, yakni pada QS Al-Baqarah/2 ayat 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

Dr. Wabah az-Zuhaili menyebutkan secara umum zakat memiliki beberapa hikmah, diantaranya:

- 1) Menjaga dan memelihara harta dari tindakan kriminal.
- 2) Sebagai bantuan bagi kaum fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan.
- 3) Menyucikan jiwa dari penyakit kikir (*bakhil*) yang menjadi tabiat manusia.⁹¹

⁸⁹ Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004).

⁹⁰ Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*.

⁹¹ Sahroni Oni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, Cetakan 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 20.

Kewajiban berzakat ditetapkan berdasarkan standar minimum kekayaan yang wajib dizakati, atau yang dikenal dengan *nisab*. Seorang muslim yang hartanya telah mencapai *nisab* wajib mengeluarkan zakat. Syaikh Wahbah az-Zhuaili menyebutkan beberapa kriteria wajib zakat, yakni:

- 1) Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Merdeka, bukan merupakan hamba sahaya.
- 3) Para pengikut Imam Hanafi memberikan kriteria harus *baligh* dan adil karena zakat sama seperti kewajiban lainnya (shalat, puasa dan lain-lain).⁹²

Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan beberapa kriteria kekayaan yang wajib dizakati yaitu meliputi:

- 1) Milik penuh
- 2) Berkembang
- 3) Cukup *nisab*.
- 4) Lebih dari kebutuhan biasa (kebutuhan pokok)
- 5) Bebas dari hutang.
- 6) Berlalu setahun (telah mencapai *haul*).⁹³

b. Infak

Menurut bahasa infak adalah memberikan harta. Sedangkan menurut istilah, infak adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat atau keinginan-keinginan si penerima harta. Menurut Undang-Undang Zakat, infak didefinisikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁹⁴ Oleh sebab itu, substansi infak lebih umum daripada substansi zakat. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS Al-Anfal/8 ayat 36,

⁹² *Ibid*, 147.

⁹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat terj. Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004), 125.

⁹⁴ Oni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, 3.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

"*Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam Neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan*"

Infak merupakan perbuatan atau sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk menutupi kebutuhan orang lain tersebut, baik berupa makanan, minuman dan lainnya yang didasarkan rasa ikhlas kepada Allah SWT. selain itu, infak juga berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib dan sunnah.⁹⁵

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang artinya benar. Secara istilah sedekah merupakan pemberian harta secara *sunnah* kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁹⁶ disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam QS At-Taubah/9 ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman*

⁹⁵ Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat* 21.

⁹⁶ Oni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, 4.

jiwa bbagi mereka allah Maha Mendengar Maha Mengetahui”

Berdasarkan ayat di atas, kata “*Shodaqotan*” didefinisikan sebagai zakat, yang mana zakat yang dimaksudkan bermakna zakat mal. Sedekah tidak boleh dilakukan untuk hal lain selain di jalan Allah SWT. karena motivasi sedekah adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. untuk menunjukkan kesejatian dan kejujuran sebagai orang yang beriman.⁹⁷ Orang yang bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujuran akan imannya kepada Allah SWT. Hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja objek yang bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi. Dalam bersedekah, seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima, karena sedekah itu haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah SWT.⁹⁸

d. Wakaf

Secara bahasa wakaf bermakna berhenti atau berdiri sedangkan secara istilah waka menurut Muhammad Ibn Ismail adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.⁹⁹ Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan

⁹⁷ *Ibid*, 6.

⁹⁸ Hadziq, “Modul 1. Fikih Zakat, Infaq dan Sedekah.”

⁹⁹ Huda Nurul et al., *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) 141.

bukan pula menjadi hak milik *nadzir*, tetapi menjadi hak Allah dalam pengertian menjadi hak masyarakat umum.¹⁰⁰

D. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

1. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia termasuk Indonesia, yang dibahas secara formal pada *United Nations Conference on Sustainable Development* yang dilangsungkan di Rio De Janeiro pada Juni 2012 dan dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015 dengan disepakati oleh lebih dari 190 negara. Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi konsep yang populer dan menjadi fokus dunia internasional sejak dipertegasnya pendekatan ini pada KTT Bumi di Rio De Janeiro pada tahun 1992.

Selain merupakan kesepakatan baru yang diinisiasi oleh PBB pada tahun 2015, *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suksesor dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berisi tujuan-tujuan *universal* dengan mempertimbangkan isu yang sangat dinamis berkaitan dengan lingkungan hidup, politik dan tentunya ekonomi. *Sustainable Development Goals* (SDGs) berisi 17 *goals*, 169 target dan 244 indikator yang diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan,

¹⁰⁰ Ikfa Nurul Fuadah, "Pendayaangunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) untuk Pemberdayaan Ekonomi di Baitul Mall Kspps Binama Kc Tlogosari," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

sanitasi dan ketersediaan air minum).¹⁰¹ Selain itu, pada tahun 2030 diharapkan 17 (tujuh belas) tujuan besar *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata negara dapat dipenuhi dunia.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan penyempurnaan *Millenium Development Goals* (MDGs) karena:

- a. SDGs dinilai lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan banyak negara dengan tujuan yang *universal* untuk negara maju dan berkembang.
- b. Memperluas sumber dana, dimana sumber pendanaan bukan hanya berasal dari bantuan negara maju melainkan juga bersumber dari swasta.
- c. Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya.
- d. Inklusif, secara spesifik menysasar kepada kelompok rentan (tidak ada yang tertinggal).
- e. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan, seperti: pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akasemisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media.
- f. *Millenium Development Goals* (MDGs) hanya menargetkan pengurangan ‘setengah’ sedangkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menargetkan untuk menyelesaikan seluruh tujuan (*Zero Goals*).
- g. *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak hanya membuat tujuan, melainkan juga sarana pelaksanaan.¹⁰²

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara

¹⁰¹ Santono Hamong dan dkk, *Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan* (Jakarta: Infid, 2015).

¹⁰² Sekretariat Nasional SDGs, “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ‘Sekilas SDGs,’” Kementerian PPN/Bappenas, n.d., <https://sdgs.appenas.go.id/sekilas-sdgs/>.

berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁰³

Proses perumusan *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengedepankan proses yang partisipatif. Sejak tahun 2013 Sekretaris Jenderal PBB memberikan ruang yang lebih luas kepada *stakeholder* non-pemerintahan untuk terlibat dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Pasca 2015. Hal ini direalisasikan dengan adanya forum konsultasi antar-*stakeholder* dan *my world survey*, yang merupakan survey yang dilakukan oleh PBB sebagai bahan masukan dalam penyusunan *Sustainable Development Goals* (SDGs). *My world survey* merupakan survei global yang bertujuan untuk menangkap pandangan dan aspirasi masyarakat dalam menentukan agenda baru yang baik demi keberlangsungan dunia yang lebih baik. Hasil survei inilah yang kemudian dijadikan salah satu pertimbangan dalam menentukan ke-17 tujuan yang ada di *Sustainable Development Goals* (SDGs).¹⁰⁴

2. Target Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan, yaitu: 1) *People* (manusia), 2) *Planet* (bumi), 3) *Prosperity* (kemakmuran), 4) *Peace* (kedamaian), dan 5) *Partnership* (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan

¹⁰³ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs*.

¹⁰⁴ Sekar Panuluh dan Meila Riskia Fitri, "Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia," *Briefing Paper 02* infid, no. Sustainable Development Goals (SDGs) (2016): 1–25, 5, http://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf.

dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.¹⁰⁵ Beberapa *point* yang termasuk kedalam 17 Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) mencakup:¹⁰⁶

- a. Tanpa Kemiskinan,
- b. Tanpa Kelaparan,
- c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera,
- d. Pendidikan Berkualitas,
- e. Kesetaraan Gender,
- f. Air Bersih dan Sanitasi Layak,
- g. Energi Bersih dan Terjangkau,
- h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi,
- i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur,
- j. Berkurangnya Kesenjangan,
- k. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan,
- l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab,
- m. Penanganan Perubahan Iklim,
- n. Ekosistem Lautan,
- o. Ekosistem Daratan,
- p. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, serta
- q. Kemitraan Mencapai Tujuan.

3. Perkembangan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan inisiatif global yang memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), *Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat dalam Sustainable Development Goal untuk Pencapaian Maqashid Syariah*, 2017, www.baznas.go.id.

manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi serta bersinergi dengan lingkungan. Di Indonesia *Sustainable Development Goals* (SDGs) dipopulerkan dengan nama lain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berdasarkan pengalaman sebelumnya dalam agenda *Millenium Development Goals* (MDGs) yang mengalami keterlambatan dalam pengimplementasiannya yang disebabkan karena Indonesia masih dalam pemulihan situasi ekonomi pasca krisis 1998, kini Indonesia berusaha untuk menghindari keterlambatan dalam pengimplementasian *Sustainable Development Goals* (SDGs) . Dalam mencapai 17 tujuan dan 169 sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030, masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah, seperti halnya mengutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam agenda pembangunan nasional, membuat pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang inklusif dan partisipatif baik di tingkat pusat maupun daerah serta memastikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dilakukan dengan semangat transformatif dan *No One Left Behind*.¹⁰⁷

Pada Desember 2015, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia telah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, Koalisi Masyarakat Sipil menuntut 3 hal kepada presiden dalam kaitannya terhadap pengimplementasian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia, yakni meliputi:

- a. Menuntut pemerintah untuk menyusun payung hukum dalam pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ,
- b. Menuntut pemerintah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional bagi pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ,
- c. Menuntut pemerintah untuk membentuk panitia bersama bagi pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) .

¹⁰⁷ Panuluh dan Fitri, “Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia”, 11.

Perlu dicatat bahwa perkembangan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia sudah berjalan dari tahap wacana atau diskursus. Selain disiapkannya Peraturan Presiden yang menjadi kerangka hukum pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia pada tingkat nasional, inisiatif yang baik juga telah datang dari pihak lain seperti pemerintah daerah, donor media, masyarakat sipil dan lainnya.¹⁰⁸

Dalam menghadapi tantangan untuk meningkatkan kinerja bagi akselerasi pemangunan nasional Indonesia hingga 2030 peranan aktif pemerintah tentu menjadi modal utama bagi pelaksanaan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Beberapa hal penting yang telah dilakukan sebagai langkah baik berbagai *stakeholder* yakni:

- a. Pemerintah Indonesia menjadi salah satu dari 193 kepala Negara dan pemerintahan yang ikut menyepakati agenda pembangunan global ini.
- b. Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah disiapkan untuk menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) .
- c. Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organization*) ikut berperan dengan membentuk Koalisi Masyarakat Sipil dalam merealisasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) .
- d. Beberapa Pemerintah Daerah telah ikut serta memulai pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) .
- e. Inisiatif yang datang dari berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi atau Universitas membawa optimisme bahwa *Sustainable Development Goals* (SDGs) akan dilaksanakan dengan prinsip inklusif dan partisipatoris.¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid*, 14.

¹⁰⁹ *Ibid*, 20.

E. *Pentahelix Model*

1. Konsep *Helix*

Sebelum lahirnya model *Pentahelix*, ada model yang telah dikembangkan yakni model *Triplehelix* dimana model ini sebelumnya merupakan rekomendasi dalam mengembangkan ekonomi, namun karena persaingan pasar yang lebih kompetitif dan bertujuan mengembangkan perusahaan dan ekspor ke pasar dunia maka lahirlah model terbarunya yakni *Quadruplehelix* dimana merupakan rekomendasi untuk kemakmuran perusahaan. Model *Quadruplehelix* adalah hasil pengembangan dari model *Triplehelix* yang mengintegrasikan inovasi, pengetahuan dan *civil society*. Ada empat *stakeholder* yang berkolaborasi dalam model *Quadruplehelix* yakni Perusahaan (*Business*), Pemerintah (*Government*), Akademisi (*Academician*), dan Masyarakat Sosial (*Civil Society*).¹¹⁰

Persaingan akses pasar dunia dan proses globalisasi yang semakin pesat, akhirnya model di atas disempurnakan dengan melibatkan media dan menjadi komponen tambahan dalam hal mendukung pengembangan ekonomi dan model ini disebut dengan model *Pentahelix*. Menurut Arif Yahya, yang dimaksud *Pentahelix* adalah kolaborasi 5 (lima) unsur subjek atau *stakeholder*, yaitu meliputi: *Academician*, *Business*, *Community*, *Government* dan *Media*. Biasa disingkat ABCGM.¹¹¹

Seperti halnya diketahui bahwa konsep *Pentahelix* dibangun dan dikembangkan di atas dua model pemangku kepentingan sebelumnya, yakni konsep *Triplehelix* dan *Quadruplehelix*. *Triplehelix* terdiri dari pemerintahan (*government*), dunia usaha (*business*), dan universitas (*academician*), sedangkan pemangku kepentingan *Quadruplehelix* ditambah dengan satu pemangku kepentingan lain yakni masyarakat sosial (*civil society*) atau lembaga non-pemerintahan (*non-government organization*).

¹¹⁰ Ishak and Sholehah, "Implementasi Model *Pentahelix* dalam Pengembangan UMKM dimasa Pandemi Covid-19 Pendahuluan."

¹¹¹ Yuniningsih, Darmi, and Sulandari, "Model *Pentahelix* dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang."

Konsep *Triplehelix* mulai berkembang sejak perang dunia kedua dimana perang dunia kedua melahirkan konsep hubungan yang komprehensif antara ilmu pengetahuan (akademisi), sektor industri atau perdagangan (dunia usaha) dan sektor publik (pemerintah) yang sangat jelas dan saling bergantung. Kolaborasi ketiga pihak atau pendekatan *Triplehelix* diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff pada tahun 1995. Kolaborasi ini menekankan bahwa interaksi ketiga komponen merupakan kunci utama bagi peningkatan kondisi yang kondusif bagi lahirnya inovasi, keterampilan kreativitas dan ide dalam pengembangan ekonomi kreatif. *Triplehelix* merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan tentang bagaimana sebuah inovasi muncul dari adanya hubungan yang seimbang, timbal balik dan terus menerus dilakukan antar aktor, meliputi akademisi (perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan), pemerintah (*governance*), dan para pelaku sektor bisnis (*enterprises*). Sinergi ketiga komponen tersebut dikenal dengan istilah ABG (*Academic, Business and Governance*).¹¹²

Konsep *Quadruplehelix* pertama kali disarankan oleh Carayannis dan Campbell pada tahun 2009 dengan menambahkan komposisi *helix* keempat dari model *Triplehelix* yang telah ada, yakni komunitas dari masyarakat dan ekonomi bagi pengetahuan dan sistem inovasi. Adapun konsep *Pentahelix* juga disarankan oleh Carayannis dan Campbell pada tahun yang berbeda yakni pada tahun 2010. *Helix* kelima ini diidentifikasi sebagai *helix* yang terasosiasi dengan media. Alasan ditambahkannya *helix* ini karena memberikan dampak bagi sistem inovasi sebuah komunitas atau negara. Peran media sangat penting dalam membentuk atau mengarahkan inovasi apa yang menjadi prioritas bagi sebuah negara.

¹¹² Acep Irawan, "Mewujudkan Prinsip Penta Helix dalam Mengelola Kekayaan Negara (Studi Kasus Penataan Sungai Citarik)," Artikel djkn (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), 2021, <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14311/Mewujudkan-Prinsip-Prinsip-Penta-Helix-Dalam-Mengelola-Kekayaan-Negara-Studi-Kasus-Penataan-Sungai-Citarik.html>.

2. Konsep *Pentahelix Model*

Pentahelix Model merupakan bentuk kerjasama yang bertujuan untuk melakukan optimasi peran dari kelima unsur *stakeholder* yang meliputi pemerintah akademisi, badan usaha (*business*), komunitas masyarakat dan media sebagai pendorong perubahan sosial yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Secara empiris, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konsep *Pentahelix* merupakan konsep yang komprehensif dalam pemetaan pemangku kepentingan. Penelitian Stuesson, dkk menunjukkan bahwa model *Pentahelix* sangat berguna untuk menyelesaikan masalah multi pihak dimana pemangku kepentingan mewakili berbagai kepentingan pada satu lokasi atau satu kasus. Sedangkan penelitian Halibas dkk menjelaskan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan *Pentahelix* dapat menunjukkan pemangku kepentingan yang mampu mendorong dan membuat inovasi.¹¹³

Konsep *Pentahelix* bertujuan untuk memberdayakan otoritas lokal dan regional dalam mengemukakan pendekatan inovatif dan hemat biaya untuk mengembangkan, membiayai, mengimplementasikan dan meningkatkan energi berkelanjutan dan rencana aksi. Tujuan utamanya adalah mengembangkan metode berbasis *Pentahelix* dan menggunakannya untuk melibatkan dan mendukung otoritas di berbagai tingkatan, bersama dengan pemangku kepentingan lainnya pada berbagai sektor untuk meningkatkan pengembangan dan implementasi suatu kegiatan.¹¹⁴

Peran dari masing-masing aktor dalam *Pentahelix* meliputi berbagai hal sebagai berikut:

¹¹³ Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, dan Abd. Rachim, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*, ed. oleh Tim Doktor Administrasi Publik Press, Cetakan Pertama (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020), dap.undip.ac.id%0Aiii, 115.

¹¹⁴ Irawan, "Mewujudkan Prinsip Penta Helix dalam Mengelola Kekayaan Negara (Studi Kasus Penataan Sungai Citarik)."

- a. Pemerintah (*Governance*). Pada model *Pentahelix*, pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus *controller* yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan bisnis.
- b. Akademisi (*Academician*). Pada model *Pentahelix*, akademisi berperan sebagai *conceptor* yang melakukan standarisasi proses bisnis dan keterampilan sumber daya manusia. Dalam hal ini akademisi merupakan sumber pengetahuan dengan konsep teori-teori terbaru dan relevan.
- c. Badan usaha (*Business*). Pada model *Pentahelix*, badan usaha berperan sebagai *enabler* yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.
- d. Komunitas masyarakat. Pada model *Pentahelix*, komunitas masyarakat berperan sebagai *accelerator*. Dalam hal ini komunitas masyarakat merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan 'bisnis' yang berkembang. Selain itu komunitas masyarakat juga bertindak sebagai perantara antar pemangku kepentingan.
- e. Media. Pada model *Pentahelix*, media berperan sebagai *expenders*, yakni mendukung publikasi dalam promosi dan membuat *brand image*.

Penggunaan model kerjasama *Pentahelix* sebagai dasar untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan perubahan sosial sangat memungkinkan untuk menciptakan keberlanjutan dari perubahan sosial yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Tidak hanya itu, perubahan sosial tersebut juga memberikan manfaat bagi publik secara luas, lingkungan sekitar dan pihak-pihak yang terlibat dalam skema *Pentahelix* itu sendiri. Model *Pentahelix* sangat berguna untuk menyelesaikan masalah multi pihak dimana pemangku kepentingan mewakili berbagai kepentingan pada satu tujuan. Kolaborasi dari 5 (lima) pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mewujudkan sebuah kebijakan yang didukung oleh beragamnya sumber daya

yang saling berinteraksi secara sinergis.¹¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa sinergitas antar unsur *Pentahelix* dapat menjadi kunci dari keberlangsungan dan keberlanjutan pengembangan masyarakat serta perubahan sosial positif yang diinginkan oleh berbagai pihak.

3. Teori *Collaborative Governance*

Governance adalah bentuk peralihan dalam “penyelenggara kebijakan publik” yang tidak hanya berpusat pada pemerintah, namun melibatkan aktor lain untuk turut berpartisipasi baik dari masyarakat, swasta, dan atau lainnya.¹¹⁶ Menurut O’leary dan Bigham kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini kemudian di dukung dengan pernyataan Bardach yang mendefinisikan *collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua instituti atau lebih yang bekerja sama dengan tujuan untuk meningkatkan *publik value* daripada bekerja sendiri-sendiri.¹¹⁷

Paradigma *governance* merupakan paradigma baru yang dianut dan menjadi populer di beberapa negara di dunia. Pemahaman dari paradigma ini yakni *implementing agency* tidak hanya menjadi monopoli pemerintah. Pada tahun 1980-an paradigma ini mulai dirancang. Negara-negara Barat dengan tujuan untuk meminimalisir peran-peran negara dalam pembangunan dan mendelegasikannya kepada aktor lain. Hal ini disebabkan karena tumbuhnya kesadaran pemerintah atas

¹¹⁵ Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, and Abd Rachim, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*, ed. Tim Doktor Administrasi Publik Press, Cetakan Pertama (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020).

¹¹⁶ Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, dan Abd. Rachim, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*, ed. oleh Tim Doktor Administrasi Publik Press, Cetakan Pertama (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020), 32-33.

¹¹⁷ Astuti, Warsono, dan Rachim, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*, 2020, 42.

kemampuannya yang semakin terbatas, baik dari segi anggaran, SDM, teknologi dan kapasitas manajemen dalam memecahkan urusan publik sendiri. Era demokrasi juga menuntut pemerintah makin terbuka dan makin inklusif dalam memberikan ruang bagi *Civil Society Organizations* dan sektor swasta untuk dapat terlibat dalam pengimplementasian suatu kebijakan.¹¹⁸

Paradigma *governance* merupakan fenomena yang muncul di negara maju dan negara berkembang untuk menganggapi keterbatasan peran yang dimiliki pemerintah. Di negara maju konsep *welfare state* telah memudar karena munculnya ideologi neo liberal. Globalisasi menyebabkan perubahan tersebut menular hingga ke negara berkembang. Selain itu adanya tekanan bagi pemerintah untuk melibatkan aktor lain dalam program pembangunan sehingga negara-negara di luar lebih plural dan dengan hadirnya berbagai aktor lain dalam program pembangunan dari tingkat lokal sampai global. Aktor-aktor tersebut berupaya untuk melengkapi peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, bahkan ada yang menggantikan peran pemerintah sebagai aktor tradisional dan pembangunan.¹¹⁹

Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintah yang melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara secara langsung, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.¹²⁰ Fokus *collaborative governance* terletak pada arah kebijakan dan masalah publik, dimana *collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Agrawal dan Lemos

¹¹⁸ Purwanto Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyarningsih, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Cetakan II (Yogyakarta: Gava Media, 2015).

¹¹⁹ Dimas Luqito Chusuma Arrozaq, "Collaborative Governance" (Universitas Airlangga, 2016), 5.

¹²⁰ A Ansell, C., & Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, no. 4 (2008): 543–571, <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.

mendefinisikan *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada pemerintah dan non-pemerintah, tetapi juga terbentuk atas adanya *multi partner governance* yang meliputi sektor privat/swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama publik-privat-sosial.¹²¹ Pendapat lain mengatakan bahwa ada tiga aktor dalam paradigma *governance* yakni *governance*, *privat sector*, *civil society* yang berperan dalam pembangunan. Namun seiring waktu, pemerintah mulai mengikutsertakan aktor non-pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani dalam program pembangunan. Sebab, kapasitas ketiganya diperlukan untuk melengkapi kapasitas aktor lain.¹²²

Model *collaborative governance* menurut H. Brinton Milward dan Keith G. Provan dibagi menjadi 3 bentuk, diantaranya:

- a. Model *self-governance* ditandai dengan struktur dimana tidak ada entitas administratif namun dengan demikian masing-masing pemangku kepentingan berpartisipasi dalam jaringan (*network*), dan manajemen dilakukan semua anggota (pemangku kepentingan) atau yang terlibat.
- b. Model *lead organization* ditandai dengan adanya entitas *administrative* (dan juga mananjer yang melakukan jaringan) sebagai anggota *network* atau penyedia layanan.
- c. Model *network administrative organization* ditandai dengan adanya entitas administratif secara tegas, yang dibentuk untuk mengelola *network* bukan sebagai *service provider* dan manajernya digaji. Model ini merupakan campuran dari dua model sebelumnya yaitu model *self-governance* dan *lead organisation*.¹²³

¹²¹ Astuti, Warsono, dan Rachim, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*, 2020, 42.

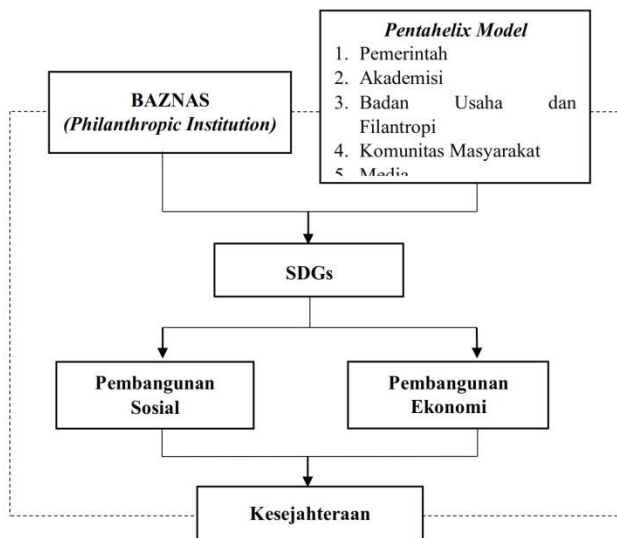
¹²² Arrozaq, "Collaborative Governance, 5."

¹²³ Sudarmo, *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance* (Smart Media, 2011).

Model *collaborative governance* muncul sebagai respons terhadap masalah-masalah publik yang semakin hari semakin kompleks, sehingga dibutuhkan berbagai aktor (multi-aktor) untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Artinya, *collaborative governance* dapat dipahami sebagai upaya untuk mengefektifkan manajemen publik melalui keterlibatan lintas aktor dalam konteks *governance*. Secara umum, model *governance* terdiri atas model dominasi negara model pemerintahan dan model multi-aktor. Model multi-aktor diyakini sebagai akar dari pendekatan *collaborative governance*.¹²⁴

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Adapun kerangka berpikir untuk penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
Sumber: Dikelola oleh Penulis, 2021

¹²⁴ Astuti, Warsono, dan Rachim, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*, 2020, 72.

Berdasarkan gambar kerangka diatas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS selaku lembaga filantropi memiliki keterkaitan yang erat dengan kelima unsur atau *stakeholder* dalam *Pentahelix* yang terdiri atas Pemerintah, Akademisi dan Pakar, Badan Usaha dan Filantropi, Komunitas Masyarakat serta Media. BAZNAS dan kelima unsur atau *stakeholder* ini berperan penting dalam pencapaian *Sustainable Developmet Goals* (SDGs), baik dari segi pembangunan sosial dan ekonomi yang saling berkaitan sehingga membawa pada kesejahteraan.





DAFTAR RUJUKAN

- Agus, Purwanto Erwan, dan Dyah Ratih Sulistyaningsih. *Implementasi Keijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Cetakan II. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Agustin, Tria, dan Mike Triani. "Analisis Peran Ganda Wanita Terhadap Kesejahteraan di Sumatera Barat." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* Volume 1, no. 2 (2019): 241–50. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/download/6167/3086>.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakat terj. Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004.
- Alfiatus Sholikhah, Nurul, Shelna Azima Azam, Dindha Ayu Bestari, Moh Khoiril Huda, dan Ratna Yunita. "Peran Lembaga Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1, no. 1 (2021): 27.
- Alimuddin, Ilyas. "Konsep Kedejahteraan dalam Islam." *Tribun Timur*. 2012. <https://makassar.tribunnews.com/2012/12/14/konsep-kesejahteraan-dalam-islam>.
- Amil Zakat Nasional, Badan. "BAZNAS Bentuk Tim Terpadu untuk Bantu Korban Bencana Banjir NTT." Badan Amil Zakat Nasional, 2020.
- . *Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020*. Jakarta: Simbi Kemenag, 2021. <https://simbi.kemenag.go.id/sim-zat/files/sGcZaVvw44wuKYDIO4FZPD1MxaUTd53rADtwQULs.pdf>.
- Amri, Ulil. "Konsep Kesejahteraan dalam Teori Ekonomi Barat dan Islam (Analisis Perbandingan Pendapat Maslow dan Al-Ghazali)." UIN Raden Fatah, 2010. <http://repository.radenfatah.ac.id/6597/>.
- Ansell, C., & Gash, A. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and*

Theory, 18, no. 4 (2008): 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.

Arrozaq, Dimas Luqito Chusuma. “Collaborative Governance.” Universitas Airlangga, 2016.

Ary, Donald, Lucy Cheser Jacobs, dan Asghar Razavieh. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Diedit oleh Diterjemahkan oleh Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Astuti, Retno Sunu, Hardi Warsono, dan Abd. Rachim. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Diedit oleh Tim Doktor Administrasi Publik Press. Cetakan Pe. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020.
dap.undip.ac.id

———. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Diedit oleh Tim Doktor Administrasi Publik Press. Cetakan Pe. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020.

Bahagijo, Sugeng, Hamong Santono, dan Mahesti⁴⁸ Okitasari. *Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Diedit oleh Leonardus W Sunarwan. Jakarta: kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas, 2019.

BAZNAS, Puskas. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2017.

Budy, Viva. “Dukcapil: Jumlah Penduduk Indonesia 272,23 Juta Jiwa pada 30 Juni 2021.” databoks, September 2021.

Dewan Pengurus Nasional Fordebi & Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Diedit oleh Ahim Abdurahim, Ahmad Djalaluddin, Aji Dedi Mulawarman, dan dkk. Cetakan 2. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Efendi, Mansur. “Pengelolaan Filantropi Islam Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komunitas Kurir Sedekah).” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2021): 1–19.
<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/filantropi/article/v>

iew/2734.

Fadlan. "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019).

Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama, 2014.

Farhan, Muhammad, dan Noor Arief. "Peran Lembaga Filantropi dalam Mengentaskan Kemiskinan Warga DKI Jakarta: Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta." *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNEBIS)* 1, no. 1 (2017).

Fathoni, Muhammad Anwar, Suryani, dan Eko Nur Cahyo. "Zakat Management Paradigm: Comparison of Indonesia, Malaysia and Saudi Arabia." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 14, no. 2 (2020): 267–82. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i2.267-282>.

Fuadah, Ikfa Nurul. "Pendayaangunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) untuk Pemberdayaan Ekonomi Di Baitul Mall KSPPS Binama Kc Tlogosari." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

Ghofur, Ruslan Abdul. "Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Economics and Business Economics Islam)* 1, no. 1 (2016): 27–39. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/140/130>.

Hadziq, M. Fuad. "Modul 1. Fikih Zakat, Infaq dan Sedekah." In *Ekonomi Ziswaf*, 17–19. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf>.

Hamong, Santono, dan dkk. *Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan*. Jakarta: Infid, 2015.

Harliadi, Dika. *Profil Hasil Analitik Fenetik Siswa pada Pembelajaran Intertebrata di Sekolah Indonesia Singapura*.

Universitas Pendidikan Indonesia, 2016.

Haryanto. *Rasulullah Way of Managing People*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Group, 2011.

Hayati, Mardhiyah. “Peran Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2012): 1–9. <https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1676>.

Hayatika, Aftina Halwa, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto. “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 874–85. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.

Heni, Noviarita, Muhammad Kurniawan, dan Gustika Nurmalia. “Pengelolaan Desa Wisata dengan Konsep Green Economy dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Wisata di Provinsi Lampung dan Jawa Barat).” *JAP: Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, no. 02 (2021): 564–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3761>.

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Irawan, Acep. “Mewujudkan Prinsip Penta Helix dalam Mengelola Kekayaan Negara (Studi Kasus Penataan Sungai Citarik).” Artikel djkn (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), 2021. <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14311/Mewujudkan-Prinsip-Prinsip-Penta-Helix-Dalam-Mengelola-Kekayaan-Negara-Studi-Kasus-Penataan-Sungai-Citarik.html>.

Ishak, Parmin, dan Nur Lazimatul Hilma Sholehah. “Implementasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan UMKM Dimasa Pandemi Covid-19 Pendahuluan.” *Gorontalo Accounting Journal* 4, no. 2 (2021): 207–24. <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1726>.

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional. “Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030,” 2021, 1–184.

http://sdgs.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2020/08/Roadmap_Bahasa-Indonesia_FileUpload.pdf.

Khairuddin, Helly. "Analisa Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (Baznas Inhil) Dengan Sustainable Development Goals (SGDs)." *Selodang Mayang* 4 (2018): 107–11.

Khanifa, Nurma Khusna. "Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 149–68. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2329>.

Lantaeda, Syaron Brigitte, Florence Daicy J Lengkong, dan Joorie M Ruru. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 48 (2017): 2–9.

Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020. Jakarta: Simbi Kemenag, 2021.

Latief, Hilman. "Filantropi Islam dan Kemiskinan." *Republika.co.id*, 2016. <https://www.republika.co.id/berita/obbhw74/filantropi-islam-dan-kemiskinan>.

———. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Makhrus. *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Diedit oleh Mahsun Ismail. *Litera*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2018. http://digital.library.ump.ac.id/827/1/Dinamika_Filantropi_Islam-Online.pdf.

Maksum, Muhammad, dan dkk. *Fikih Zakat on SDGs*. Jakarta Selatan: UIN Jakarta Press, 2018.

Mannan, Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Terj. Pota. Jakarta: PT. Intermasa, 1992.

Mesiono. *Islam dan Manajemen*. UIN Sumatera Utara. Cetakan Pe. Medan: Perdana Publishing, 2019.

- Muhammadiyah, Lazis. *Pedoman Zakat Praktis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- Muharromah, Gabriele Lailatul. "Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2021): 1–16.
- Muhyi, Herwan Abdul, dan Arianis Chan. "The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City." *Review of Integrative Business and Economics Research* 6, no. 1 (2017): 412–17. <http://buscompress.com/journal-home.html>.
- Nagvi, Syed Nawab Haider. *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sistesis Islami*. Bandung: Mizan, 1985.
- Nasrulloh. "Filantropi Islam: Praktek dan Kontribusinya terhadap Ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs)." in *Proceedings 3rd Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS) Kopertais Wilayah IV Surabaya*. 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/ancoms.v3i1.250>.
- Normasyhuri, Khavid, Budimansyah, dan Ekid Rohadi. "Strategi Pengelolaan Zakat , Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19." *Jiei: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1947–62. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5792>.
- Nurul, Huda, Achmad Aliyadin, Agus Suprayogi, dan dkk. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Oni, Sahroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, dan Setiawan Adi. *Fikih Zakat Kontemporer*. Cetakan 1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Oxford. *Learner's Pocket Dictionary*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Panuluh, Sekar, dan Meila Riskia Fitri. "Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia." *Biefing Paper 02* infid, no. Sustainable Development Goals (SDGs) (2016): 1–25. <http://www.sdg2030indonesia.org/an>

component/ media/upload-
book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf.

- Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor. "Profil Sejarah," 2019.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2021.
- . *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2021.
- . *Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2021.
- . *Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat dalam Sustainable Development Goal untuk Pencapaian Maqashid Syariah*, 2017. www.baznas.go.id.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Diedit oleh Syahrani. Cetakan 1. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Diedit oleh Terj. Soeroyo. Jilid 1. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Sekretariat Nasional SDGs. "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 'Sekilas SDGs.'" Kementerian PPN/Bappenas, n.d. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>.
- Sinring, H. "Membangun Akses Sanitasi dan Air Bersih dengan Dana Zakat." *Bakti News*, 2020.
- Siyoto, Sandu, dan M Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Diedit oleh Ayup. Cetakan 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Suardi, Didi. "Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34. <https://doi.org/10.36-908/isbank>.

Sudarmo. *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Smart Media, 2011.

Sudiyo dan Fitriani. "Lembaga Ziswaf Sebagai Lembaga Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bandar Lampung." *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*, 2019, 85–89. <http://jurnal.polinela.ac.id/index.php/PROSIDING>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-26. Bandung: Alfabeta, ISBN: 979-8433-64-0, 2017.

Suharto, Edi. "Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos." *WelfareStateDepsos*, 2006. <http://www.policy.hu/suharto/NaskahPDF/ReinventingDepsos.pdf>.

Sulastrri, Lilis. *Manajemen: Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori dan Praktik*. Cetakan 1. Bandung: La Goods Publishing, 2012.

Susilawati, Nilda. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Zakat Produktif di Desa Bukit Paninjauan I Kecamatan Seluma." *Hawa* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2230>.

Tamin, Imron Hadi. "Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal." *Jurnal Sosiologi Islam* 1, no. 1 (2011): 36–58.

Badan Amil Zakat Nasional. "Tentang BAZNAS," n.d. <https://baznas.go.id/profil>.

Wardani, Rakhma. "Pertama di Indonesia, BAZNAS Berkomitmen Dukung Proyek HIBAH Bidang EBT." Kementerian Sumber Daya dan Mineral, 2017. <https://ebtke.esdm.go.id/post/2017/07/20/1713>

[/pertama.di.indonesia.baznas.berkomitmen.dukungprojek.hibah.bidang.ebt](https://pertama.di.indonesia.baznas.berkomitmen.dukungprojek.hibah.bidang.ebt).

Widyastuti, Astriana. "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009."

Economics Development Analisis Journal 1, no. 2 (2012): 1–11. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.

php/edaj.

World Health Organization (WHO). “Sustainable Development Global Solutions Network (SDGs).” In *United Nation*. Jakarta, 2015.

Yulhendri, Yulhendri, dan Nora Susanti. “Analisis Konfirmatory Faktor Pengukuran Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga.” *Jurnal Ilmiah Econosains* 15, no. 2 (2017): 185–202. <https://doi.org/10.21009/econosains.0152.02>.

Yuniningsih, Tri, Tri Darmi, dan Susi Sulandari. “Model Pentahelik dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang.” *Journal of Public Sector Innovation* 3, no. 2 (2019): 84–93.

